



KABUPATEN BADUNG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 903 / 6224 / SETDA / BPKAD
903 / 1640 / DPRD

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Manguparaja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- b. Nama : I Wayan Suyasa, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.
- c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala" Jalan Raya Sempidi, Mengwi
Badung - Bali.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan, dan rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Mangupura, 5 Agustus 2022

BUPATI BADUNG

selaku
PIHAK PERTAMA


I NYOMAN GIRI PRASTA, S.Sos

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

selaku
PIHAK KEDUA


Dr. Drs. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA


I WAYAN SUYASA, SH
WAKIL KETUA


Drs. I MADE SUNARTA, MM., M.Si
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HAL

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	
1.4 Lampiran PPAS Perangkat Daerah	
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	
 BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Badung/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	
3.2. Sikronisasi Kebijakan Kabupaten Badung/Kota dengan Prioritas Pembangunan Propinsi.....	
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	
3.4. Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	
 BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN.....	
4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja tak Terduga Tahun Anggaran 2022	

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	
5.1 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2022	
BAB VI PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PPAS

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, secara konstitusi telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, secara substantional produk hukum tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah termasuk juga Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kondisi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. oleh karena itu, prinsip otonomi daerah memiliki implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengamanatkan agar senantiasa berorientasi pada pengaluran sumber daya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri (*zelfstandigheid*).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan adanya perubahan pendekatan dalam penganggaran (*budgeting reform*) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan mengalokasikan sumber daya yang menganut prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas serta berorientasi pada hasil kinerja. prinsip ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas terlentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana masyarakat (*public money*) agar dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas mengarahkan agar penggunaan anggaran dapat mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Dalam konteks otonomi daerah maka penerapan prinsip tersebut merupakan jembatan bagi Pemerintah Daerah dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, jenis belanja harus dikelompokkan ke dalam

kegiatan-kegiatan (sebagai *cost object*) dengan menetapkan berbagai standar biaya, pelayanan minimal dan kinerja (*outcome, impact and benefit*).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu instrumen kebijakan bagi Pemerintah Daerah yang memuat ukuran-ukuran kinerja, sebagai acuan dalam mengevaluasi program berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah. Dengan demikian, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas perangkat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. APBD juga sebagai potret mengenai besaran pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pembangunan serta otorisasi pengeluaran bagi semua aktivitas dari berbagai unit Perangkat Daerah (PD) dalam satu tahun anggaran.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. APBD dikelola secara tertib mengamanatkan agar keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat pada peraturan perundang-undangan menuntut dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Efektif diarahkan pada pencapaian hasil program agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Efisien berkaitan dengan pencapaian keluaran yang maksimum dengan penggunaan masukan terendah. Sedangkan ekonomis diarahkan pada pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Dalam Penyusunan APBD harus memperhatikan Prinsip-prinsip (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan (f) Taat Asas. Oleh karena itu, proses anggaran seharusnya

diawali dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan. Dalam hal ini penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada Perangkat Daerah; dan
- b. Untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Tujuan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun RKA-SKPD;
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan PPAS yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

- Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 - v. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - z. Peraturan Bupati Badung Nomor 98 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok PPAS terdapat pada Pasal 89, 90 dan 91 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

- a. Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD;
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - (3) PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
- b. Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :
 - (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.

(4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan :

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Lampiran PPAS Perangkat Daerah :

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								441,373,899,099	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,043,073	
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Nilai LKjIP	77.62 Nilai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,555,190	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Nilai LKjIP	77.62 Nilai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,487,883	
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								437,282,672,827	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,282,672,827	
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								653,267,580	
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	653,267,580	
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								871,899,074	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Administrasi Umum	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,418,134	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Administrasi Umum	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	495,039,897	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Cakupan Administrasi Umum	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,500,003	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Cakupan Administrasi Umum	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	187,290,000	
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Administrasi Umum	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,651,040	
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,820,043,288		
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,912,955	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,679,130,333	
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							734,973,257		
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,100,000	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	636,107,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,395,557	
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,370,000	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							335,307,535,443		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							199,738,421,694		
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	678,382,503	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,576,910,778	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,384,414,997	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,804,043,145	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 paket	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,643,156,492	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	249 paket	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,126,965,030	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 paket	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	489,077,995	
1	01	02	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 unit	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,058,464,536	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	416 Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	239,705,099	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	298 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,097,800	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	271 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,060,202	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2542 Orang	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,110,170,066	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	213,038,468	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	271 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340,574,583	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,895,360,000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama								110,468,043,067	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,486,488,063	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 unit	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,897,197	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 paket	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,876,783,462	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	28 paket	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,570,773,396	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	28 paket	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238,455,948	
1	01	02	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	971,946,913	
1	01	02	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,146,390,718	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	85 Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,981,152	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	55 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	128,798,407	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1064 Orang	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,211,885,530	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,299,733	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	55 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	169,572,548	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,297,770,000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								24,015,170,682	
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,020,861,210	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263,503,104	
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	580 siswa	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %		725,971,852	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	553 Peserta Didik	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,607,493,595	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	357 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,413,688	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,148,002,110	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %		53,080,336	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %		170,544,787	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	357 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,904,300,000	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								1,085,900,000	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,085,900,000	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN								1,544,101,932	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								1,472,760,232	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 Orang	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,472,760,232	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								71,341,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,341,700	
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN								31,382,421,564	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								1,937,775,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	26 Unit	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,937,775,000	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								19,422,589,069	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,522,452,374	
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %		17,650,136,695	
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	166 Orang	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi								7,463,069,200	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1807 orang	Persentase Prestasi Atlit pada Tingkat Provisni dan atau Nasional	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,463,069,200	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								2,558,988,295	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Sub Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,558,988,295	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							547,737,163		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							547,737,163		
2	19	04	2.01	07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Persentase PeJmbinaan dan PengembaJngan Kepramukaan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	547,737,163	
TOTAL													810,155,695,201	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							157,544,270,627		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							22,536,588		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,316,763	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,219,825	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							141,207,483,535		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 orang/bulan	Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,207,483,535	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							14,782,800		
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,782,800	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							3,215,419,205		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,538,450	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 paket	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,059,934,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,786,255	
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,160,000	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								62,932,065	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,932,065	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7,112,452,292	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,475,208	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,203,381,424	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,874,595,660	
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,908,664,142	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,849,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,200,087,858	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	549,036,784	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,690,000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								187,032,937,872	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								14,055,026,757	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 unit	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	330,320,627	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 unit	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,154,032	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,466,882,659	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	39 paket	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,502,212,099	
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11 unit	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,944,767	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1383 unit	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	972,300,317	
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	168 paket	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,212,256	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								172,018,159,716	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11040 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	651,723,672	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10538 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	361,929,460	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10036 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	632,464,057	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33048 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	578,521,975	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	389,991,453	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Masyarakat usia produktif (15-59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	330317 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,272,842,805	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	207,534,216	
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8054 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,478,600	
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3029 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	156,478,600	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	624 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,850,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	546 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,068,175,885	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15138 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,868,922,756	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,930,565,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,626,632,438	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,860,083	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,905,374	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen 5 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	614,660,038	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,229,670	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 52 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	126,615,000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah orang yang dilakukan skrining orang dengan masalah kesehatan (ODMK) jiwa	3656 orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	297,718,030	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	622,001,713	
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	381 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,957,589,966	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,803,490,685	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	202 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	101,486,204,186	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	0 Paket 28 paket	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,400,000	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,207,138	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	473 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,837,667,002	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 unit	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,874,009	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 dokumen	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,000,000	
1	02	02	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	62 Keluarga	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,115,839	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %		62,140,680	
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80 Orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,301,921,860	
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %		7,447,526	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								680,373,454	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 dokumen	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	65 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	680,373,454	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								279,377,945	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit 13 unit	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	70 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	279,377,945	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								1,306,685,487	
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								238,291,624	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2300 dokumen	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	238,291,624	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								1,068,393,863	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25 orang	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	90 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,068,393,863	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								326,159,124	
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								151,094,903	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 dokumen	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	98 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,823,274	
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 sarana	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	98 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,271,629	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								95,516,322	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 dokumen	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice	92 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,516,322	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								30,937,899	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan	90 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,937,899	
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								48,610,000	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit 0 Unit	Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	92 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,610,000	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								1,435,501,531	
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,143,648,073	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	Jumlah regulasi pemerintah daerah	4 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,143,648,073	
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								291,853,458	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat	60 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	291,853,458	
TOTAL													347,645,554,641	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								130,708,890,806	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								106,484,286,081	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit	0 Orang/bulan 100 %	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,484,286,081	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24,224,604,725	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit	0 Laporan 100 %	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,036,320,500	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	0 Laporan 100 %	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,188,284,225	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								175,374,415,273	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								7,374,415,273	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	0 Unit 100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,141,962,910	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit	100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	202,722,120	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rs	0 Unit 100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,029,734,800	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit	100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,999,995,443	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								168,000,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	81 %	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	81 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,000,000,000	
TOTAL													306,083,306,079	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								29,388,657,830	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								230,501,927	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 dokumen		116,748,440	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 dokumen		113,753,487	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,625,384,977	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		21,387,831,374	
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		85,600,244	
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		74,883,638	
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		1,936,970	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		75,132,751	
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								107,290,660	
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD pada SKPD	12 Dokumen		107,290,660	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								535,740,757	
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		18,209,800	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		17,017,315	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		323,145,848	
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		26,111,712	
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Paket	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		55,344,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		1,775,376	
1	03	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	12 dokumen		94,136,106	
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								599,159,935	
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah berjalan optimal	100 %		108,247,764	
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah berjalan optimal	100 %		490,912,171	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								692,265,498	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen		162,955,920	
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Dokumen		529,309,578	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5,598,314,076	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		91,003,865	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	103 unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		3,020,491,053	
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	38 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		2,443,134,219	
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		19,070,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		16,344,939	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah yang di pelihara	142 Unit		8,270,000	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								11,633,872,048	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								3,005,119,080	
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (SDA)	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,234,157,136	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.9 km	Tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (SDA)	100 %		150,049,292	
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit	Tersedianya sistem informasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (SDA)	100 %		620,912,652	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								8,628,752,968	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	8 Dokumen	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %		635,214,813	
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.15 KM	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	295,195,076	
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4.2 km	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %		1,443,418,023	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.5 km	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %		5,055,486,923	
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Jumlah bendung irigasi yang di operasikan dan dipelihara	20 Bendung	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %		1,094,356,731	
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	27 Dokumen	Terselamatkannya Debit Air yang Melintas di Saluran	100 %		105,081,402	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								303,170,681	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								303,170,681	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.1 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen	Cakupan layanan air bersih di Kabupaten Badung meningkat	100 %		303,170,681	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								2,757,438,993	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								2,757,438,993	
1	03	04	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Badung	100 %		653,633,568	
1	03	04	2.01	02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74 %	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Badung	100 %		104,947,823	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74 %	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	300 Rumah Tangga	Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan persampahan di Kabupaten Badung	100 %		1,998,857,602	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH								265,306,086	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota								265,306,086	
1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97.4 %	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Badung	100 %		265,306,086	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								28,148,198,120	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								28,148,198,120	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah kabupaten secara optimal	100 %		1,520,321,236	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah kabupaten secara optimal	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25,772,268,428	
1	03	08	2.01	03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah kabupaten secara optimal	100 %	Kab. Badung, Kuta, Tuban	102,672,703	
1	03	08	2.01	04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah kabupaten secara optimal	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	601,449,857	
1	03	08	2.01	09	Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	100 %	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 Dokumen	Terselenggaranya bangunan gedung di wilayah kabupaten secara optimal	100 %		151,485,896	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								128,009,052,380	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								128,009,052,380	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	15 Kawasan	Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %		126,978,685,987	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	09	2.01	06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	Tertatanya bangunan gedung dan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	1,030,366,393	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN								84,875,603,043	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								84,875,603,043	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		998,645,741	
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	11727 m2	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		12,111,471,440	
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		194,591,524	
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		515,906,789	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6.4 Km 0 KM	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		34,388,690,482	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5.8 Km	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		11,742,220,367	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	881.945 Km	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		18,348,492,818	
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	13 M	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		5,853,416,295	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1582.27 m	Peningkatan Pelayanan Kepada Pengguna Jalan	100 %		722,167,587	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								789,895,808	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								11,456,545	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	30 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Kabupaten Badung	40 Orang		1,691,346	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30 Orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Kabupaten Badung	40 Orang		7,826,110	
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Kompeten di Kabupaten Badung	40 Orang		1,939,089	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								106,085,653	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 Laporan	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	3 Dokumen		86,441,603	
1	03	11	2.02	04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	3 Dokumen		19,644,050	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								672,353,610	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	12 Dokumen		672,353,610	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG								1,759,887,294	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								372,762,285	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan								

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,012,959,706	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								287,701,122	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	281,316,411	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		6,384,711	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,842,011,540	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Prosentase Terpenuhi Administrasi Keuangan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,842,011,540	
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								483,466,191	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,686,406	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	235,213,192	
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,910,893	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,117,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,940,076	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,230,000	
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,368,524	
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								66,045,000	
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,045,000	
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								362,893,407	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,492,453	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,965,000	
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	307,435,954	
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								970,842,446	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		82,472,500	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	782,002,800	
1	04	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,000,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77,828,696	
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,538,450	
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								205,054,940	
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								189,074,229	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	12 Dokumen	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	189,074,229	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								7,715,117	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah	Persentase dibangun dan direhabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,509,742	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah	Persentase dibangun dan direhabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	100 %		3,205,375	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan								8,265,594	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen 0 Dokumen	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,378,053	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Dokumen	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %		1,887,541	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								925,018,074	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman								501,975,727	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	3 Dokumen	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,721,788	
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	6 Laporan	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,253,939	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								242,233,558	
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,071,677	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,051,674	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Laporan	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,021,674	
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6 Laporan	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	141,891,735	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	6 Laporan	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %		1,182,765	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	6 Dokumen	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,014,033	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								180,808,789	
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,499,523	
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,205,402	
1	04	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,103,864	
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH								153,771,889	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota								153,771,889	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 Unit Rumah	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,813,131	
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,958,758	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							27,918,222,948		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							27,918,222,948		
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	12 Dokumen	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	886,953,314	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	24 Lokasi	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,322,708,598	
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %		698,241,657	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	12 Laporan 0 Laporan	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,319,379	
TOTAL													41,215,027,557	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan			
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											29,788,080,829	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											7,094,976	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		3,939,756				
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		3,155,220				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											28,380,643,864	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		28,380,643,864				
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											355,334,236	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		7,000,000				
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		302,434,000				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		13,980,236				
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Terlaksananya layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		31,920,000				
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											20,977,355	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		20,977,355				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											30,603,433	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		22,003,433	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		5,100,000	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		3,500,000	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							993,426,965		
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		899,920,630	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		93,506,335	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							4,064,224,916		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							2,309,762,548		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1800 kasus	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %		2,260,093,098	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60 kasus	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %		32,532,150	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota	24 dokumen	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %		1,633,144	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 31 dokumen	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %		5,976,710	
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 dokumen	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %		9,527,446	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota								1,754,462,368	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 laporan	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	90 %		2,978,897	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	90 %		1,748,139,355	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	90 laporan	Terlaksananya Penegakan Perda dan Perkada	90 %		3,344,116	
												TOTAL	33,852,305,745	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								33,473,073,637	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,387,865	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	Terlaksanya Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,145,903	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terlaksanya Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,241,962	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								28,678,368,103	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	193 Orang	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,678,368,103	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								657,697,104	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapnnya	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	657,697,104	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								871,769,770	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah dengan baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,846,150	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah dengan baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,788,886	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah dengan baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	790,081,800	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah dengan baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,782,934	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	708 Dokumen	Terlaksanya administrasi umum perangkat daerah dengan baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,270,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							40,268,182		
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Terlasananya kegiatan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,268,182	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,293,356,060		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Terlaksanya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,545,182	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Terlaksanya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	647,990,233	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Terlaksanya layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang baik dan lancar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	629,820,645	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,924,226,553		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,388,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,804,871,191	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,860,000	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	Terlaksananya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,107,362	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								14,809,134,550	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								14,490,814,195	
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	Terlaksananya pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	180,569,133	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Terlaksananya pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,419,182,464	
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Terlaksananya pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,516,417	
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Terlaksananya pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,425,364,189	
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	Terlaksananya pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	408,181,992	
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							245,547,556		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	100 Dokumen	Tersedianya dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,547,556	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran							15,941,199		
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	Tersedianya dokumen yang memuat hasil investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian, pengujian dan penyebab kejadian kebakaran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,941,199	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							56,831,600		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	Terlaksana penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran serta terbentuknya relawan pemadam kebakaran di Desa/Kelurahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,832,256	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12 Desa/Kelurahan	Terlaksana penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran serta terbentuknya relawan pemadam kebakaran di Desa/Kelurahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,999,344	
TOTAL													48,282,208,187	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								8,191,708,993	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,759,816	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6,666,284	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	5,093,532	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6,326,859,847	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	6,326,859,847	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								186,930,741	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	2,745,279	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	7,420,244	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	130,452,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	11,213,218	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	413 eksemplar	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	35,100,000	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								104,337,981	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		104,337,981	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								875,577,410	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	19,264,999	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		274,020,045	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	582,292,366	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								686,243,198	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 kendaraan	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	617,069,846	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	53 unit	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	65,683,352	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100 %	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	3,490,000	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							5,328,071,330		
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							66,286,305		
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	66,286,305	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							5,153,382,571		
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDNB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,475,076,794	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	25 orang	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,644,309,530	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 orang	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,996,247	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								108,402,454	
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pasca bencana Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % 100 %	jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dam kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,503,246	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pasca bencana Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 % 100 %	jumlah penanganan dokumen pasca bencana kabupayten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	4 dokumen	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,899,208	
TOTAL													13,519,780,323	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,140,554,376	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,927,426	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		7,629,572	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		4,297,854	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,229,141,458	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		9,229,141,458	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								214,808,253	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		5,443,834	
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		167,080,751	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		21,008,668	
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 dokumen	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		21,275,000	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,373,252	
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		33,767,030	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		29,400,000	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		63,206,222	
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								558,303,987	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		538,055,200	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 26 Unit	persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		16,591,448	
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		3,657,339	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								529,244,908	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								529,244,908	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	100 %	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 keluarga 0 Keluarga	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %		19,739,196	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	100 %	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 lembaga	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %		509,505,712	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								519,022,049	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								517,998,087	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 orang	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %		151,018,315	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %		215,915,423	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %		114,044,557	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	100 orang	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %		31,919,393	
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota	100 orang	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %		5,100,399	
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial								1,023,962	
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %		475,399	
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 dokumen	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %		548,563	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								21,430,346,555	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								21,430,346,555	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 orang	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %		39,875,051	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 keluarga	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %		5,414,169	
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24760 keluarga	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %		21,385,057,335	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA								67,675,002	
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota								37,864,395	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %		26,202,066	
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %		11,662,329	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								29,810,607	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100 %		29,810,607	
TOTAL													32,686,842,890	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							41,395,388,004		
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							243,647,919		
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan		105,164,827	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan		138,483,092	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							36,586,325,947		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan 265 orang	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Tepat Waktu	12 Bulan		36,586,325,947	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							1,573,710,291		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah paket komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		10,833,783	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		20,003,358	
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		3,608,770	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		1,477,165,180	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		13,919,200	
2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		43,680,000	
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		4,500,000	
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,266,552	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		20,266,552	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,124,583,179	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		3,000,000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		1,121,583,179	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,846,854,116	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	94 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		87,261,155	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		1,439,177,811	
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		3,534,300	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		102,087,810	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		214,793,040	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								1,031,610,077	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								814,848,415	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air , Udara dan Laut	4 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan		702,235,822	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan		112,612,593	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								70,348,503	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12 Laporan	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan		70,348,503	
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								146,413,159	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	12 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan		73,194,465	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12 Dokumen	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12 Bulan		73,218,694	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								13,350,031,754	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								13,350,031,754	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100 %	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	10.689519 Ha	Terpeliharanya Taman Di Kabupaten Badung	12 Bulan		13,350,031,754	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								134,406,499	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3								103,951,565	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	150 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara	12 Bulan		103,951,565	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								30,454,934	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	12 Dokumen	Tertanganinya Limbah B3 Dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		30,454,934	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								412,063,052	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								412,063,052	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	12 Laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		393,596,808	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	15 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan		18,466,244	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								68,811,765	
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH								68,811,765	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	10 Dokumen	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12 Bulan		68,811,765	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								77,305,193	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								77,305,193	
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	100 Lembaga	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	12 Bulan		3,480,855	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen	Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	12 Bulan		73,824,338	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								71,080,921	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								71,080,921	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	50 Entitas	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten	12 Bulan		71,080,921	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								222,880,193	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								222,880,193	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12 Dokumen	Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	12 Bulan		222,880,193	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								64,526,942,653	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah								64,526,942,653	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	Persentase Pengurangan Sampah yang Dilakukan dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	27 %	Terkelolanya Sampah di Kabupaten/Kota	12 Bulan		3,433,030,559	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	Persentase Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota	72 %	Terkelolanya Sampah di Kabupaten/Kota	12 Bulan		61,013,606,033	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok	Terkelolanya Sampah di Kabupaten/Kota	12 Bulan		80,306,061	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.12.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									121,290,520,111	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,300,655,209	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,563,667	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 dokumen	presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,405,917	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan 0 Laporan	presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,157,750	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,354,109,386	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan 0 Orang/bulan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10,354,109,386	
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,173,822,877	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket 0 Paket	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,846,150	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket 0 Paket	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	113,792,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket 0 Paket	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	18,502,677	
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen 0 Dokumen	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	11,490,000	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen 0 Dokumen	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,026,192,050	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,109,856,996	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 0 Laporan	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	20,902,966	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan 0 Laporan	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,009,233,528	
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	79,720,502	
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								658,302,283	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit mobil 0 Unit	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	87,071,655	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit mobil 13 unit sepeda motor	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	457,160,628	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	216 unit	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	114,070,000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							1,397,155,887		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							970,142,257		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 dokumen 0 Dokumen	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA	62 desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	461,000,288	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk	0 Dokumen 3 dokumen	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA	62 desa	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	509,141,969	
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							427,013,630		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	6 dokumen 0 Dokumen	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang	62 desa/kelurahan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	427,013,630	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL								1,281,411,619	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								1,281,411,619	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	0 Dokumen 10 dokumen	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	117,545,447	
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 layanan	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,163,866,172	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								276,387,066	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								174,281,470	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50 %	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 dokumen 0 Dokumen	Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun	62 desa/kelurahan	Kab. Badung, Mangwi, Sempidi	102,515,204	
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50 %	jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	3 laporan	Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun	62 desa/kelurahan	Kab. Badung, Mangwi, Sempidi	71,766,266	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							102,105,596		
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50 %	jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	6 dokumen 0 Laporan	Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengleolaan data SIAK	62 desa/kelurahan	Kab. Badung, Mangwi, Sempidi	102,105,596	
TOTAL													16,255,609,781	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,243,819,902	
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,984,319	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 dokumen	Terlaksananya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,359,711	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Terlaksananya Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,624,608	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,445,531,296	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,445,531,296	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								166,792,903	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,499,500	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,456,740	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,976,663	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,860,000	
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,229,348		
2	13	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	106,231,748	
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,997,600	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							507,282,036		
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,413,927	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit mobil 12 unit sepeda motor	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	376,967,041	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Terlaksananya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,901,068	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA							5,804,856		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								5,804,856	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	1 desa	Terlaksananya Penataan Desa	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,804,856	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,765,142,929	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1,765,142,929	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	46 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,142,897,963	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	46 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,667,660	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	46 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209,628,990	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah dokumen Profil Desa	46 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,230,682	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	115,230,333	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,487,301	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								2,066,407,030	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,066,407,030	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,201,060	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	258,278,280	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 laporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,354,328	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	46 Desa	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,747,573,362	
TOTAL													14,081,174,717	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16,827,553,609	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								83,567,323	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Akuntabel	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,913,502	
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Akuntabel	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,585,640	
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang Akuntabel	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,068,181	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,593,656,499	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,593,656,499	
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								221,597,482	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,497,500	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,047,650	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,089,832	
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	260 dokumen	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,962,500	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								38,677,222	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,665,738	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,601,200	
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,410,284	
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								890,055,083	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	803,297,310	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,680,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,076,873	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								56,971,355	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota								1,539,088	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintahan	30 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,539,088	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								55,432,267	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik, Hukum, sosial dan Ekonomi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,432,267	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								246,684,912	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								246,684,912	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Pelindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	246,684,912	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								217,173,288	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								22,292,647	
2	08	04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,292,647	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								194,880,641	
2	08	04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	Jumlah Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 layanan	Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	194,880,641	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								53,793,612	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								53,793,612	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	45 dokumen	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	50 buku	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,793,612	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								51,173,696	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								36,206,862	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	Jumlah Organisasi Pemeintah, Non Pemeintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organiasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 organisasi	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,457,628	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,749,234	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								14,966,834	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	Persentase Lembaga Forum Anak yang Aktif	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,966,834	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							43,533,963		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							43,533,963		
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 dokumen	Jumlah laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,533,963	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							1,349,894,798		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							276,223,366		
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dokumen 12 dokumen	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,943,266	
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 laporan	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,280,100	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							608,743,528		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	62 Organisasi	Rasio PLKB dan PKB di setiap Desa atau Kelurahan	1.2 orang/des	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,743,764	
2	14	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 laporan	Rasio PLKB dan PKB di setiap Desa atau Kelurahan	1.2 orang/des	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,999,764	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota								430,505,001	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	300 laporan	Persentase Faskes yang Melayani KB	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	430,505,001	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								34,422,903	
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	12 laporan	Jumlah Kampung KB yang Dibina	6 Kampung KB	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,422,903	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								43,511,252	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								7,010,233	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2.14.2.08.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 laporan	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	0.14 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,010,233	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								36,501,019	
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 laporan	Persentase Kelompok yang Dibina	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,501,019	
TOTAL													18,890,290,485	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								51,730,331,304	
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,248,451	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	6,932,949	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,315,502	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,216,216,760	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,203,473,321	
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,141,479	
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,805,191	
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,796,769	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								512,005,964	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,846,150	
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	477,118,376	
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,041,438	
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,000,000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,350,536,682		
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9,708,277	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,050,399,495	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,428,910	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,640,323,447		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	196,682,958	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	842,083,903	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,061,747	
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	553,494,839	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								23,633,487,510	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota								4,314,345,447	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,209,415,314	
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %		3,104,930,133	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								16,005,308,262	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	713 unit	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %		7,659,563,580	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4500 unit	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %		8,345,744,682	
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir								5,482,147	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %		5,482,147	
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								1,250,229,063	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	21000 unit	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %		608,801,028	
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 unit	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %		641,428,035	
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								2,041,974,333	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %		91,730,636	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	40 unit	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %		866,898,711	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %		1,083,344,986	
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota								482,127	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %		482,127	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								15,666,131	
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %		424,875	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %		13,253,493	
2	15	02	2.08	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	100 % 100 %	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %		1,987,763	
TOTAL													75,363,818,814	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,110,515,236	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								80,778,015	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42,313,409	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38,464,606	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,618,210,530	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 orang/bulan 0 Orang/bulan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12,582,038,997	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	43 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24,296,144	
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,109,176	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8,766,213	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								68,540,926	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	68,540,926	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								196,016,771	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangabn Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	13,048,670	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	132,062,500	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8,250,955	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	39,330,000	
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,324,646	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								35,520,000	
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	113 Unit	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	35,520,000	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								272,372,863	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	114,191,663	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	156,681,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,500,000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							839,076,131		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	86,671,655	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	649,275,597	
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	103,128,879	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							5,124,943,846		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							5,124,943,846		
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	118,865,983	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	245,152,968	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4,531,682,773	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,092,757	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	174,825,601	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,102,216	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	48,221,548	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								48,920,236,650	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								45,205,966,274	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	62,614,257	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,141,743,777	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	42,001,608,240	
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								3,714,270,376	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	974,527,189	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	5 Unit	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,638,821,967	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	99,381,511	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,539,709	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								263,186,780	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								263,186,780	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan,Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	8 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,502,932	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	47 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	254,785,917	
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4,897,931	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							13,855,551		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							12,634,174		
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4,084,020	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,633,722	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4,347,803	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasin	38 PD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,568,629	
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							1,221,377		
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 PD	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	4 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,221,377	
TOTAL													68,432,738,063	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,852,284,222	
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,314,201	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Sebagai Pedoman Pelaksanaan PD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,761,338	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Sebagai Pedoman Pelaksanaan PD	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,552,863	
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,802,083,312	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,802,083,312	
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								266,939,857	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,094,330	
2	17	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,149,167	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,846,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,232,960	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	396 Dokumen	Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,617,000	
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								130,831,267	
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Lancarnya Kegiatan Rutin	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,483,692	
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Lancarnya Kegiatan Rutin	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,347,575	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Lancarnya Kegiatan Rutin	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,000,000	
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								641,115,585	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,473,100	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	462,427,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	126 Unit	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Dinas	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,214,985	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM								2,574,497	
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								2,574,497	
2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	60 Unit Usaha	Terpenuhinya Izin Usaha Simpan Pinjam yang Difasilitasi	60 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,574,497	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								110,110,786	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								110,110,786	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Unit Usaha	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Koperasi	138 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,176,423	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Pereturan Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen Koperasi	138 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,934,363	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI								137,605,557	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								137,605,557	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	Meningkatnya Kemampuan Jangkauan Pelayanan dan Meningkatnya Kesehatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,605,557	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								318,061,539	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								318,061,539	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	Meningkatnya Kualitas SDM Pengelola Koperasi	347 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	318,061,539	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								98,377,975	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota								98,377,975	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	Meningkatnya Produktifitas, Penguatan Kelembagaan dan Penataan Manajemen Usaha Koperasi	20 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,377,975	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								126,624,710	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								126,624,710	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	372 Unit Usaha	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM yang Berdaya Saing	572 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,348,295	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM yang Berdaya Saing	572 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,583,636	
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM yang Berdaya Saing	572 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,081,491	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM yang Berdaya Saing	572 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,978,508	
2	17	07	2.01	06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	Meningkatnya Jumlah Produk UMKM yang Berdaya Saing	572 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,632,780	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							290,302,256		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							290,302,256		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	600 Unit Usaha	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro bagi UMKM	600 Unit Usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	290,302,256	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							102,570,576		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							100,910,030		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Terwujudnya Pasar yang Representatif	1 Unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,910,030	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							1,660,546		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Terwujudnya Dokumen Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,660,546	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							60,891,825		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							7,435,093		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	Tersedianya Infomasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,435,093	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							53,456,732		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	Tersedianya Informasi harga Kebutuhan Pokok	98 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,563,376	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Tersedianya Informasi harga Kebutuhan Pokok	98 Laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,893,356	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							298,648,388		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							298,648,388		
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	Tersedianya Informasi Produk dan Pelaku Usaha Berpotensi Ekspor	5 Produk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,431,746	
3	30	05	2.01	05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	Tersedianya Informasi Produk dan Pelaku Usaha Berpotensi Ekspor	5 Produk	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,216,642	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							487,142,098		
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							487,142,098		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	Meningkatnya Standar Tertib Ukur di Wilayah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475,328,859	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.0.00.03.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	Meningkatnya Standar Tertib Ukur di Wilayah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,813,239	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								98,953,966	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								98,953,966	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM	10 UMKM	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,953,966	
TOTAL													15,984,148,395	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								24,948,083,035	
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,142,016	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,909,097	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,232,919	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								22,221,572,457	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,221,572,457	
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2,695,017	
2	18	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPTSP	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,695,017	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								661,588,421	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,501,600	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,043,835	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	470,868,684	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,564,302	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Persentase Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,610,000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,090,723,564	
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,100,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,086,623,564	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								960,361,560	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,470,100	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit Mobil 28 Unit Motor	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	738,362,450	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 Unit	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	139,529,010	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							471,059,832		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							114,669,938		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100 %	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	112,869,281	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	15 Kegiatan Usaha	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,800,657	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							356,389,894		
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100 %	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,915,996	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100 %	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,473,898	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							217,717,638		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							217,717,638		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100 %	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,066,621	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	173,651,017	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							1,341,558,346		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							1,341,558,346		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,328,405,407	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,526,806	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100 %	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	35 Orang	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,772,864	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15 Kegiatan Usaha	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,853,269	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							23,098,205		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							23,098,205		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 PMA/PMO	Persentase terlaksananya Pengendalian penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,671,940	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 PMA/PMO	Persentase terlaksananya Pengendalian penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,154,325	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	300 PMA/PMO	Persentase terlaksananya Pengendalian penanaman modal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,271,940	
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								975,494,844	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								975,494,844	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	975,494,844	
TOTAL													27,977,011,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15,671,240,209	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,050,680	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 paket		3,125,340	
2	22	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan LKjIP, IKU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 paket		2,925,340	
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								14,021,989,581	
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan		14,021,989,581	
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								227,139,563	
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Tersedianya Administrasi Umum	1 paket		10,500,000	
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Tersedianya Administrasi Umum	1 paket		179,776,500	
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Tersedianya Administrasi Umum	1 paket		17,183,063	
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 dokumen	Tersedianya Administrasi Umum	1 paket		19,680,000	
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								235,812,589	
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket		17,004,502	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket		64,968,500	
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan	Jumlah Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,839,587	
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,180,247,796		
2	22	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,870,100	
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit 22 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	977,344,635	
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket		109,139,332	
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket		10,893,729	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							94,368,767,482		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							10,192,917,438		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	0 Objek 592 Objek	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah	1 Paket		10,108,912,286	
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	592 Orang 0 Orang	Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah	1 Paket		84,005,152	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								58,972,529,576	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek 3343 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,972,529,576	
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota								25,203,320,468	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Kecamatan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek 0 Objek	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1 Paket		301,309,520	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1525 Orang 0 Orang	Jumlah Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,902,010,948	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL								17,633,787,537	
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								17,633,787,537	
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	720 Orang 0 Orang	Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 paket		1,331,983,232	
2	22	03	2.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	22 sertifikat	Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 paket		392,582,525	
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	182 lembaga 0 Lembaga	Jumlah Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	1 paket		15,909,221,780	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH								5,333,140,032	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								5,333,140,032	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang di berdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1991 Orang 0 Orang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,489,925,028	
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	401 unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,643,623,776	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	170 Dokumen 0 Dokumen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,591,228	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA								20,351,498,042	
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								543,315,815	
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 Unit	Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	92 Objek 0 Objek	Jumlah pendaftaran Objek Cagar Budaya	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	413,128,244	
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	17 Objek 0 Objek	Jumlah pendaftaran Objek Cagar Budaya	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,187,571	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota								19,808,182,227	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	218 Objek 0 Objek	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket		19,655,539,056	
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 Unit	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	46 Objek	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	1 Paket	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	152,643,171	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								1,353,234,013	
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								1,353,234,013	
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit 0 Unit	Dapat Melayani dan Memberi Akses Masyarakat ke Museum	1 paket		485,640,283	
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit 0 Unit	Dapat Melayani dan Memberi Akses Masyarakat ke Museum	1 paket		458,339,150	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit 0 Unit	Dapat Melayani dan Memberi Akses Masyarakat ke Museum	1 paket		409,254,580	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									154,711,667,315	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								16,514,094,993	
2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								6,525,656	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	4,163,779	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,361,877	
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,538,320,110	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	15,538,320,110	
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								258,231,623	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12,801,230	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	170,681,500	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	9,214,493	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65,534,400	
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								24,632,468	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10,032,468	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12,100,000	
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,500,000	
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								686,385,136	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	45,650,555	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	515,387,623	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	125,346,958	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN								363,092,151	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								294,450,361	
2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	4790 Orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,825,545	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	4790 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	81,995,740	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	4790 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	142,629,076	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								68,641,790	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59.22 Nilai	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,641,790	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO								71,020,668	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota								71,020,668	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan dirawat	30 Naskah	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71,020,668	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								477,520,875	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								239,485,460	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 Unit kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,915,506	
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 Unit kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,333,254	
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 Unit kerja	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,236,700	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							103,908,596		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1400 Arsip	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,908,596	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							134,126,819		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	Jumlah Arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	65,477,595	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	Jumlah Arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68,649,224	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							35,568,488		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							35,568,488		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	Jumlah perangkat daerah/unit kearsipan yang melaksanakan Penyusutan	3 Unit Kearsipan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,568,488	
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP								38,577,548	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota								38,577,548	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Bangsa	30 orang	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	Jumlah arsip tertutup yang dipinjamkan	100 Berkas	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	38,577,548	
TOTAL													17,499,874,723	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,143,938,652	
3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,590,762	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	21 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,225,754	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	21 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,365,008	
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,795,755,736	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	648 orang/bulan	Jumlah pegawai yang dibayar gaji dan tunjangannya tepat waktu	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,795,755,736	
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								411,000,760	
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,000,000	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,284,621	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,790,036	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	292,533,920	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,882,573	
3	25	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,160,000	
3	25	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,349,610	
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								41,056,942	
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tepat Waktu	12 bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	6 unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,056,942	
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								284,402,244	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,515,204	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	248,387,040	
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							600,132,208		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,600,771	
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	401,161,280	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,953,757	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa	72,416,400	
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP								356,259,743	
3	25													

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								24,418,658,062	
3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,999,601	
3	26	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,181,414	
3	26	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,818,187	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,624,438,764	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,624,438,764	
3	26	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								412,738,699	
3	26	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	DTW yang memungut retribusi	6 DTW	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	412,738,699	
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								346,683,689	
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,456,139	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,930,999	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,625,000	
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	209,986,240	
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,775,311	
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,910,000	
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								868,146,716	
3	26	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	530,424,286	
3	26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,722,430	
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								138,212,285	
3	26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan		11,810,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
 Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan		126,402,285	
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,016,438,308	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,404,891	
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan		1,597,998,311	
3	26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
3	26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	191,507,690	
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	121,527,416	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								9,007,534,632	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								589,162,118	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	29 DTW	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	480,798,878	
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39 Dokumen	Terkelolanya DTW di Kab. Badung	29 DTW	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,363,240	
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							236,527,287		
3	26	02	2.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,658,784	
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,342,306	
3	26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	72 %	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,526,197	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							7,986,761,221		
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit	Destinasi yang dikelola	58 Destinasi	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,986,761,221	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota							195,084,006		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12 Laporan	Usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan serta yang sudah tersertifikasiasan	400 usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,438,984	
3	26	02	2.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	100 Unit Usaha	Usaha pariwisata yang mendapat pembinaan dan pengawasan serta yang sudah tersertifikasiasan	400 usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,645,022	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							5,544,419,328		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							5,544,419,328		
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	637 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	687,482,690	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40 %	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Laporan	kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	637 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,429,932,224	
3	26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen	kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	637 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,747,264	
3	26	03	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen	kunjungan wisatawan mancanegara ke kabupaten Badung	637 orang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	273,257,150	
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							111,264,627		
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							111,264,627		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	04	2.02	09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	Usaha Ekonomi kreatif yang berpartisipasi	50 usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,003,346	
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	Usaha Ekonomi kreatif yang berpartisipasi	50 usaha	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,261,281	
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								615,240,701	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar								615,240,701	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	100 %	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	30 Orang	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	600 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,087,963	
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	600 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,232,302	
3	26	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	100 %	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	jumlah masyarakat yang berpartisipasi	600 orang	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	497,920,436	
TOTAL													39,697,117,350	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							2,431,354,014		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							1,630,456,300		
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Indeks Pertanaman	2.08 Indeks	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	475,387,219	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	5 Laporan	Indeks Pertanaman	2.08 Indeks	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	1,155,069,081	
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							162,885,000		
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	15 Ton	Indeks Pertanaman	2.08 Indeks	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	162,885,000	
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							638,012,714		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	Indeks Pertanaman	2.08 Indeks	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan	638,012,714	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								10,631,075	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								5,822,090	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	93 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95.98 Indeks	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,822,090	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								4,808,985	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	93 %	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95.98 Indeks	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,808,985	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								29,423,724	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								29,423,724	
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95.98 Indeks	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	16,481,720	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95.98 Indeks	Kab. Badung, Abiansemal, Punggul Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	12,942,004	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								38,085,054,296	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,998,587	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	6,292,383	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5,706,204	
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								34,181,878,911	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKjIP	84.55 0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1752 Orang/bulan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34,181,878,911	
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								8,074,254	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	5,856,918	
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,217,336	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								861,459,776	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	24,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	49,550,851	
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	34,171,273	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	664,775,565	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	21,442,087	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Indeks RB (reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	67,020,000	
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,441,757,118		
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	704,489,958	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	725,267,160	
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,579,885,650		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,318,747,185	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	411 Unit	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	145,638,465	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKjIP	84,55 0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24.96 Indeks	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	115,500,000	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							9,858,333,889		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							7,096,356,885		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Sulangai	2,260,094,270	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,836,262,615	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							388,791,010		
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,338,257	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,452,753	
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								32,183,591	
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	32,183,591	
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer								1,400,529	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,400,529	
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota								6,754,337	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.3 Ton	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	6,754,337	
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain								2,332,847,537	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	162 Ekor	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	2,332,847,537	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								11,473,889,452	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian								8,606,446	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Luas Tanam Padi	20739.85 Ha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	8,606,446	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian								8,456,862,434	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Luas Tanam Padi	20739,85 Ha	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Buduk Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka	8,456,862,434	
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota								3,008,420,572	
3	27	03	2.03	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Luas Tanam Padi	20739.85 Ha	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan	3,008,420,572	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER								2,909,706,509	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota								2,614,770,716	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	13 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,614,770,716	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota								65,171,772	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,171,772	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								229,764,021	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,195,588	
3	27	04	2.04	03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1 Laporan	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Abiansemal, Mambal	110,309,241	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %		75,259,192	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								420,180,945	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								420,180,945	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Kuta, Semua Kelurahan Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kelurahan Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	122,180,873	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.10.0000 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulasi	100 %	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Sulangai	298,000,072	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1,739,274,192	
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1,739,274,192	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Sobangan Kab. Badung, Abiansema, Blahkiuh Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng	644,818,148	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,406,280	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 Unit	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0.15 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	884,049,764	
TOTAL													66,957,848,096	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							123,547,855		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi							123,547,855		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya	5 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	215 Orang	Jumlah Pencari Kerja/Magang yang Meningkatkan Kualitasnya untuk dapat Mengisi Lowongan Pekerjaan dan Jumlah LPKS yang Meningkatkan Kualitasnya dan Berdaya Saing Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pengurus/ Pengelola LPKS dengan Penerapan Standarisasi Mutu LPKS	43 LPK		52,179,030	
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya	5 %	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	43 LPK	Jumlah Pencari Kerja/Magang yang Meningkatkan Kualitasnya untuk dapat Mengisi Lowongan Pekerjaan dan Jumlah LPKS yang Meningkatkan Kualitasnya dan Berdaya Saing Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pengurus/ Pengelola LPKS dengan Penerapan Standarisasi Mutu LPKS	43 LPK		71,368,825	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							594,876,066		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota							249,154,271		
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	27 %	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	15 orang		249,154,271	
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							206,441,370		
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	27 %	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Teraftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	1300 Orang		206,441,370	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								139,280,425	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	27 %	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Mendapatkan Pembinaan	120 Perusahaan	Meningkatnya Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang yang Melakukan Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Badung	120 Perusahaan		139,280,425	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL								183,660,031	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								103,613,365	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21.03 %	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5111 orang		68,729,431	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21.03 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5111 orang		34,883,934	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								80,046,666	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	31.03 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	60 Perkara	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %		71,707,616	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	31.03 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %		8,339,050	
3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								12,847,489,774	
3	31	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								9,459,445	
3	31	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		5,328,533	
3	31	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		4,130,912	
3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								11,902,236,271	
3	31	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang		11,902,236,271	
3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								369,664,142	
3	31	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		5,639,000	
3	31	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		21,727,957	
3	31	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		290,508,980	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		12,548,205	
3	31	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	444 Dokumen	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun		39,240,000	
3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							13,169,908		
3	31	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		7,169,908	
3	31	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		6,000,000	
3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							552,960,008		
3	31	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		85,286,955	
3	31	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		431,238,995	
3	31	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	32 Unit	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		36,434,058	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							1,130,475,091		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							1,130,475,091		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	20 IKM		262,551,053	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	20 IKM		69,262,238	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	20 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	20 IKM		775,151,747	
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	20 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	20 IKM		23,510,053	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI								89,051,511	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								89,051,511	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		89,051,511	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								150,709,665	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								150,709,665	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Sub Unit Organisasi : 3.31.2.07.0.00.05.0000 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase IKM yang Terdata di SIINas	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		150,709,665	
TOTAL													15,119,809,993	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target				
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN									1,372,715	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota									1,372,715	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,372,715		
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN									80,531,869	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									80,531,869	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,531,869		
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG									72,192,154	
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong									1,515,894	
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong	1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,515,894		
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong									70,676,260	
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,676,260		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									196,840,514,881	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									48,042,815	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,796,558	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,246,257	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								61,484,800,531	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan 0 Orang/bulan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,765,473,100	
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	684,206,399	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,388,804	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan 12 Laporan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,732,228	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8,589,532	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,589,532	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								191,971,044	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket 1 Paket	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		191,971,044	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30,920,091,468	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		12,719,936,888	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 0 Paket	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		92,152,627	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		1,100,546,938	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN								1,372,715	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota								1,372,715	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,372,715	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN								80,531,869	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								80,531,869	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,531,869	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG								72,192,154	
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong								1,515,894	
2	10	08	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong	1 Dokumen	Persentase Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,515,894	
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong								70,676,260	
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,676,260	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								196,840,514,881	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								48,042,815	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen 0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,796,558	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan penganggaran	4 Dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,246,257	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								61,484,800,531	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan 0 Orang/bulan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,765,473,100	
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	684,206,399	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,388,804	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan 12 Laporan	Cakupan layanan Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,732,228	
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								8,589,532	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Cakupan layanan Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,589,532	
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								191,971,044	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket 1 Paket	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		191,971,044	
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30,920,091,468	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		12,719,936,888	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 0 Paket	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		92,152,627	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.2.10.7.01.02.0000 Sekretariat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	26 Laporan	Cakupan Administrasi Umum perangkat Daerah	100 %		1,100,546,938	
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								61,786,668,709	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5,164,828	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen		3,256,881	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 laporan	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen		1,907,947	
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,802,625,187	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Paket		13,528,231,044	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Paket		16,221,992	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 dokumen	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Paket		255,916,675	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Paket		2,255,476	
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								4,729,643,958	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		166,910,967	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		184,697,394	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		46,616,467	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		1,076,970,586	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		127,141,556	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 dokumen	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		539,284,155	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		585,711,516	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		623,884,692	
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 dokumen	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Paket		1,378,426,625	
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								424,795,129	
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	136,898,000	
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit				161,246,129	
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pengadaan	2 paket			Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	126,651,000	
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								72,030,323	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 laporan				11,833,971	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan				60,196,352	
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,358,624,850		
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit				2,010,203,443	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit				22,866,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	673 Unit				325,555,407	
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							39,092,178,093		
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	520 Orang/Bulan				37,994,119,184	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	40 paket				788,172,150	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang				309,886,759	
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							1,301,606,341		
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan				434,482,580	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan				867,123,761	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							62,469,047,154		

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								7,058,384,391	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 dokumen	Jumlah Perda dihasilkan	15 perda		2,635,973,662	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 dokumen	Jumlah Perda dihasilkan	15 perda		4,253,443,118	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	500 dokumen	Jumlah Perda dihasilkan	15 perda		11,204,682	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3 dokumen	Jumlah Perda dihasilkan	15 perda		157,762,929	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								601,618,102	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	Jumlah sidang yang terlaksana	20 kali		109,078,484	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	Jumlah sidang yang terlaksana	20 kali		109,512,239	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	Jumlah sidang yang terlaksana	20 kali		110,271,428	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	Jumlah sidang yang terlaksana	20 kali		110,040,548	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	Jumlah sidang yang terlaksana	20 kali		162,715,403	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								4,572,801,075	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 laporan	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		658,137,004	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	12 laporan	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		733,893,751	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		718,087,587	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		696,792,267	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 laporan	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		702,559,695	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		343,972,103	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	Prosentase kegiatan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan oleh DPRD	84 kegiatan		719,358,668	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								10,974,205,450	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen				2,042,034,757	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	720 dokumen				4,662,863,468	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	27 orang				2,292,137,632	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 orang				253,882,937	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	120 dokumen				1,712,500,357	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen				10,786,299	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								9,296,137,058	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	40 dokumen	Jumlah pokok pikiran dan aspirasi yang terserap dari masyarakat	1 Paket		9,735,038	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 dokumen	Jumlah pokok pikiran dan aspirasi yang terserap dari masyarakat	1 Paket		9,286,402,020	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								2,351,365,987	
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 laporan	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	12 kegiatan		2,351,365,987	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								27,614,535,091	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82.50 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	103 dokumen 0 Dokumen	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	76 kegiatan		22,422,501,074	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82.50 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 dokumen	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan anggota DPRD yang terfasilitasi	76 kegiatan		5,192,034,017	
TOTAL													124,255,715,863	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18,457,131,684	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								153,682,077	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		14,299,351	
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		38,205,382	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		101,177,344	
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,274,804,067	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 0 Orang/bulan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %		17,274,804,067	
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								313,754,279	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		10,526,300	
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Paket 21 Paket	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		54,197,536	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0 Paket 7 Paket	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		2,808,490	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor	0 Paket 16 Paket	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		134,849,000	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 25 Paket	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		63,312,953	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		48,060,000	
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								17,000,000	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		5,000,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		12,000,000	
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								697,891,261	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		100,588,652	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		529,442,664	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4 Unit	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		12,210,000	
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 31 Unit	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %		55,649,945	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								951,474,494	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								634,790,303	
5	01	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %		431,150,966	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %		5,930,378	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %		60,355,533	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %		35,847,797	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %		101,505,629	
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							41,518,349		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	0 Dokumen 5 Masukan	Persentase Masukan Analisis Data dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		41,518,349	
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							275,165,842		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		70,200,361	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %		204,965,481	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							818,882,922		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							172,442,243		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		13,609,471	
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	25 Laporan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		102,091,520	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		12,775,487	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	3 Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		43,965,765	
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								232,311,386	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,057,269	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 Laporan 6 PD	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,383,451	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 Laporan 6 PD	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,172,753	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,346,287	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,955,706	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Laporan 5 PD	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,129,627	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Laporan 5 PD	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,130,944	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	Terkoordinasinya Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	11 PD	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,135,349	
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah								414,129,293	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,860,980	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,054,406	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,629,912	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,224,048	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,558,300	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 PD	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,225,945	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 PD	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,647,021	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,928,681	
TOTAL													20,227,489,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								30,625,142,777	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,009,483	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase Kesesuaian Antara Renja SKPD Dengan RKPD	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	8,032,619	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	Persentase Kesesuaian Antara Renja SKPD Dengan RKPD	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	438,407	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Persentase Kesesuaian Antara Renja SKPD Dengan RKPD	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,538,457	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27,571,898,432	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	27,527,120,732	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP	100 %	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	1 Laporan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33,830,531	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP	100 %	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10,947,169	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,849,772,074	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	3,450,800	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	1,542,627,675	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	10,372,401	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	226,911,688	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33,259,510	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	33,150,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							510,228,563		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	36,300,563	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	363,080,000	
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	40,848,000	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Materai dan Buku Cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 Bulan	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	70,000,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							681,234,225		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	94,825,275	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	308,928,950	
5	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	12,210,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	165 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	12 Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	265,270,000	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								509,829,746,915	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								3,667,063,259	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022	6 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	160,129,628	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022	6 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	138,122,254	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	9 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	299,072,211	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	9 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	290,606,056	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Peraturan Peraturan Terkait Keuangan Daerah	35 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	25,832,923	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	1 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	2,753,300,187	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							366,860,480,558		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,057,000,480	
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,289,784	
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	12 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	349,619,410,278	
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	178,780,016	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							695,163,106		
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	4 Laporan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	30,993,442	
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	159,119,667	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	28,161,900	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Buku Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	409,043,516	
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah	1 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	14,029,295	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Perda Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	53,815,286	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							138,607,039,992		
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing masing Kabupaten se- Provinsi Bali	2 Laporan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,616,080,594	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Tersedianya Dana untuk Kebutuhan Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,990,959,398	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							3,888,077,468		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								3,888,077,468	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Jumlah Standar Harga yang Tersusun	1 Dokumen	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,330,192	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %		23,638,661	
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,984,547	
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,983,024	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %		47,297,284	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,805,164,054	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,064,061	
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	242,175,458	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	96,138,110	
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatkan dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	70 Orang	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,302,077	
TOTAL													544,342,967,160	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								107,426,943,263	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,152,510	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60 dokumen	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %		9,578,974	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	12 laporan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %		1,612,268	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %		3,961,268	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								103,953,628,403	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245 orang/bulan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		103,953,628,403	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								574,044,776	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		3,486,792	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		23,111,977	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		415,147,482	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		64,288,525	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 dokumen	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		68,010,000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								317,571,720	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit				317,571,720	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,198,160,970		
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan 0 Laporan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		30,858,810	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		1,167,302,160	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,368,384,884		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		46,268,950	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	74 unit	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		886,297,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	208 unit 0 Unit	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		435,818,934	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH							6,935,967,349		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah							6,935,967,349		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	12 dokumen 0 Dokumen	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		230,182,351	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 laporan	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		33,890,493	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		702,289,107	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		1,445,792,015	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 SPP 0 Obyek Pajak	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		993,737,615	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 dokumen	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		683,749,323	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.10.0000 Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	103027 dokumen	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		549,940,852	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	19329 dokumen 0 Dokumen	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		1,682,235,762	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	23 laporan 0 Laporan	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		585,599,336	
5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	Cakupan pajak daerah yang dikelola dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD)	10 jenis pajak		28,550,495	
TOTAL													114,362,910,612	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								13,050,556,131	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,086,510	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,784,827	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,301,683	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,251,128,452	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,247,838,452	
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,290,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								314,567,569	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,877,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,856,970	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142,976,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,787,599	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	444 Ekslemper	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,070,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							51,000,000		
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							20,400,000		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,400,000	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							406,373,600		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,970,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	231,060,000	
5	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	42 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,360,000	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,000,000	
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,983,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								2,210,651,947	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								1,015,821,269	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,624,543	
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	892,690,528	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	506 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,413,570	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 lembaga	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,892,827	
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,199,801	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN								220,963,169	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,045,542	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	143,363,866	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	316 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,553,761	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN								874,856,919	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	414,134,892	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,648,525	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 orang	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	397,812,144	
5	03	02	2.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 laporan	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,594,735	
5	03	02	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 dokumen	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,728,686	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	130 orang	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,937,937	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								99,010,590	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,814,539	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,018,960	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,945,391	
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	766 orang	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,345,983	
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 orang	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,404,785	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dokumen	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,480,932	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								6,189,518,136	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis								2,333,390,097	
5	04	02	2.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 dokumen	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,938,729	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	215 orang	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,287,451,368	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								3,856,128,039	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	47 orang	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	520,657,234	
5	04	02	2.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 dokumen	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,770,868	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 laporan	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,333,699,937	
TOTAL													21,450,726,214	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,936,288,036	
5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,948,205	
5	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,948,205	
5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								8,409,958,855	
5	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan 0 Orang/bulan	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,399,295,800	
5	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Jumlah dokumen administrasi perangkat daerah	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,663,055	
5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								332,247,850	
5	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,497,015	
5	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 paket	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,157,485	
5	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	211,498,690	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 Paket 1 paket	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,654,796	
5	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	780 Dokumen	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,716,000	
5	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	7 sub kegiatan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,723,864	
5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								455,265,530	
5	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Barang milik daerah sebagai penunjang pelaksanaan administrasi urusan pemerintah daerah	2 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	288,819,343	
5	05	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Barang milik daerah sebagai penunjang pelaksanaan administrasi urusan pemerintah daerah	2 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	166,446,187	
5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								47,979,235	
5	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,929,235	
5	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,550,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Ketersediaan jasa penjunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,500,000	
5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							678,888,361		
5	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	Ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,124,720	
5	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	510,681,936	
5	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	Ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,272,500	
5	05	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	7 unit	Ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,288,110	
5	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	Ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,521,095	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							3,504,904,660		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							698,583,630		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	2.01	03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan 0 Laporan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,569,065	
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang dikelola dengan baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan 0 Laporan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	224,011,460	
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 rekomendasi	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,519,177	
5	05	02	2.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	432,483,928	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								846,005,885	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	5 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	526,120,777	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	2.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen 0 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	5 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,760,473	
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	5 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236,124,635	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								338,879,119	
5	05	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	3 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,420,285	
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	3 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,215,261	
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	3 dokumen	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	199,243,573	
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								1,621,436,026	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218,024,008	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Sub Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan 0 Laporan	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	602,407,657	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	660,219,844	
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,446,555	
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,337,962	
TOTAL													13,441,192,696	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								21,526,658,431	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,090,545	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,108,384	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,982,161	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								20,686,568,113	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bl	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,686,568,113	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								222,655,998	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,500,000	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	160,800,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,615,998	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,740,000	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							170,412,352		
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,412,352	
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							75,033,626		
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,723,626	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,310,000	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							358,897,797		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,001,055	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,050,656	
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,846,086	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								524,154,345	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal								156,321,575	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,820,861	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,701,857	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,875,484	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,343,550	
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,603,886	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,975,937	
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							367,832,770		
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	367,832,770	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							758,056,054		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi							758,056,054		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,106,530	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,168,722	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	634,112,004	
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	114,668,798	
TOTAL													22,808,868,830	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								9,708,993,143	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,175,734	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		5,993,102	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		4,182,632	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7,908,126,137	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45 Orang		7,908,126,137	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								312,373,982	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket		3,496,220	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket		257,891,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket		16,486,762	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	231 Paket		34,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								989,853,063	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket		14,022,399	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket		67,632,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36 Paket		908,198,664	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								488,464,227	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	25 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		391,978,223	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		47,182,054	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	3 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47 Unit		49,303,950	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								507,023,246	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								4,958,637	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		4,958,637	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								502,064,609	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	3035 Dokumen	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	35 Dokumen	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	3035 Dokumen		1,116,193	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	3035 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3000 Laporan	Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat	3035 Dokumen		500,948,416	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								706,996,312	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								706,996,312	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	25 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket		14,699,343	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3591152 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket	Kab. Badung, Petang, Semua Kelurahan	3,265,025	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	27 Paket		689,031,944	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								29,903,408	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Petang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								29,903,408	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil sinergitras dengan Kopolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		29,903,408	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								161,773,566	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								161,773,566	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Orang		161,773,566	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								10,826,910	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								10,826,910	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	36 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	12 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	36 Dokumen		4,053,580	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	36 Dokumen	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	36 Dokumen		6,773,330	
TOTAL													11,125,516,585	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								11,410,928,403	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,122,761	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Paket		5,953,116	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Paket		4,169,645	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,211,068,200	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 orang/bulan		10,211,068,200	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								344,939,649	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183 Paket		3,499,697	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183 Paket		300,331,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183 Paket		16,448,452	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	180 Dokumen	Jumlah Paket dan Dokumen pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183 Paket		24,660,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								454,708,724	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan		12,904,599	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan		87,596,580	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Laporan		354,207,545	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								390,089,069	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 unit		305,109,585	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	80 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 unit		35,528,984	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104 unit		49,450,500	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								554,938,376	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								7,558,596	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	2 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	2 Laporan		7,558,596	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								547,379,780	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	260 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket		1,408,480	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7188 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan non Perizinan	6926 Laporan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7186 Paket		545,971,300	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								934,205,374	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								924,493,005	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26 Paket		16,815,225	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26 Paket	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kelurahan	5,334,045	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	26 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	26 Paket		902,343,735	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								9,712,369	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan				9,712,369	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								22,262,960	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								22,262,960	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara RI	12 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		22,262,960	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								124,625,269	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								124,625,269	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Abiansemal

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	240 orang	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 orang	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	240 orang		124,625,269	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								28,105,532	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								28,105,532	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen	Jumlah Dokumen pada sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen		9,288,685	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen		18,816,847	
TOTAL													13,075,065,914	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan				Target
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									26,046,118,999	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									9,190,650	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	5,433,248		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	3,757,402		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									22,420,259,582	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Bulan	Jumlah Orang/Bulan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	130 Orang/Bulan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	22,420,259,582		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									663,467,590	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah	580 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	8,629,290		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah	580 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	579,326,500		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah	580 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	21,511,800		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	576 Dokumen	Jumlah Laporan dan Unit pada Kegiatan Administrasi Umu Perangkat Daerah	580 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	54,000,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,222,980,438	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	32,537,103	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	388,772,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1,801,671,335	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								730,220,739	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	615,734,979	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	64,473,600	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166 Unit	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	50,012,160	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								5,055,817,736	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								5,458,860	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14978 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	10 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	5,458,860	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,050,358,876	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14968 Paket	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	186 Dokumen	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14968 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	2,175,327	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14968 Paket	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14782 Laporan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	14968 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	5,048,183,549	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,242,888,073	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								1,122,883,769	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	67 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	16,450,419	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	1,873,820	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	76 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1,104,559,530	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							118,454,971		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket			Jumlah Unit dan Pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	115 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kelurahan	31,429,898	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas	Jumlah Unit dan Pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	115 Paket	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	87,025,073	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							1,549,333		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	215 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	1,549,333	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								56,827,740	
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								56,827,740	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	56,827,740	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								204,350,974	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								204,350,974	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1110 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480 Orang	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umu Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1110 Orang	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	204,350,974	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								11,304,182	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								11,304,182	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	2,143,530	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 Dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 Dokumen	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	9,160,652	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Mengwi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
TOTAL									32,617,307,704	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								15,191,168,678	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								133,752,352	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	JUmlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Paket		127,749,613	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Paket		6,002,739	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								13,091,105,868	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/Bulan	Jumlah orang/bulan pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	84 orang/bulan		13,091,105,868	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								552,374,237	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket,dokumen dan laporan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket		6,497,966	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket,dokumen dan laporan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket		478,208,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah paket,dokumen dan laporan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket		19,787,771	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	396 Dokumen	Jumlah paket,dokumen dan laporan pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1 Paket		47,880,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								868,403,677	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Jumlah laporan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan		34,997,251	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah laporan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan		260,239,330	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah laporan pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan		573,167,096	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								545,532,544	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	Jumlah unit pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan desa	131 Unit		86,671,655	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Jumlah unit pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan desa	131 Unit		375,697,095	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	Jumlah unit pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan desa	131 Unit		57,634,794	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah unit pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan desa	131 Unit		25,529,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								4,561,822,443	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								18,814,364	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ZJumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen 1 Dokumen	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	18,814,364	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								471,729,005	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Dokumen 1 Paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3 Dokumen 1 laporan	Jumlah dokumen pada urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Jumlah lembaga kemasyarakatan dan laporan pada kegiatan koordinasi pemberdayaan desa	1 Dokumen 1 Paket		471,729,005	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								4,071,279,074	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	2 Laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	2 Laporan		4,071,279,074	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,392,525,789	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								1,352,082,648	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	19,233,580	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	808,700	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	1,332,040,368	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								38,766,031	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan unit dan pokmas/ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	1 Paket 1 paket	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 pokmas/ormas	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan laporan pada kegiatan koordinasi pemberdayaan desa Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Paket 1 pokmas/ormas		38,766,031	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1,677,110	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kuta Utara

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kelurahan	1,677,110	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							3,239,258		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							3,239,258		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketrriban Umum	4 laporan	jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian negara repubik indonesia	4 laporan	jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 laporan		3,239,258	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							225,564,814		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							225,564,814		
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang pada program penyelenggaraan pada urusan pemerintahan umum	100 Orang	jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	Jumlah orang pada program penyelenggaraan pada urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 Orang		225,564,814	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							88,742,421		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							88,742,421		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Dokumen	jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	8 dokumen	Jumlah Dokumen pada kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8 Dokumen		84,137,483	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Dokumen	jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	6 dokumen	Jumlah Dokumen pada kegiatan fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	8 Dokumen		4,604,938	
TOTAL													21,463,063,403	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								19,944,253,181	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,194,244	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen		5,052,533	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen		3,141,711	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								16,418,369,620	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang/Bulan	Jumlah Orang/Bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94 orang		16,418,369,620	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								798,088,461	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket		10,166,545	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket		696,545,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket		25,976,916	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	Jumlah Paket Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 paket		65,400,000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								178,636,302	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit				178,636,302	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,560,105,167	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan		72,691,542	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan		430,941,860	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan		1,056,471,765	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								980,859,387	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 unit		86,421,155	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 unit		689,354,575	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 unit		155,083,657	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181 unit		50,000,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								3,541,105,861	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								821,583,065	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8 laporan		818,665,628	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah laporan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	8 laporan		2,917,437	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								2,719,522,796	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	12 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	Jumlah laporan pada kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4 laporan		2,719,522,796	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,749,953,608	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								1,619,583,235	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 lembaga	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan		13,126,077	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan		5,072,491	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan		1,601,384,667	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								128,221,475	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 lembaga	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 laporan		8,063,560	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 pokmas/ormas	Jumlah laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5 laporan		120,157,915	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								2,148,898	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	Jumlah laporan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4 laporan		2,148,898	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								59,067,561	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								59,067,561	

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Kuta

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	4 laporan 100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 laporan		59,067,561	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								271,103,908	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								271,103,908	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang		271,103,908	
TOTAL													25,565,484,119	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								14,761,383,184	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,169,484	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen		6,210,914	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 dokumen		3,958,570	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,292,098,675	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	Jumlah orang/bulan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63 orang		12,292,098,675	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								532,202,849	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah paket dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 paket		6,501,412	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	Jumlah paket dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 paket		469,165,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Jumlah paket dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 paket		19,996,437	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Jumlah paket dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	36,540,000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,114,127,623	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan		34,997,840	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	344,110,739	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan		735,019,044	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								812,784,553	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	82,220,600	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 unit	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	606,580,523	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	60 unit	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 unit		86,483,430	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5 unit	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 unit		37,500,000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								4,584,930,121	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								82,500,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 paket	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen		82,500,000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								471,946,736	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 paket	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Unit Kerja di Kecamatan	2 Laporan		471,946,736	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								4,030,483,385	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6 paket	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	3 laporan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	3 Laporan		4,030,483,385	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1,485,723,067	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								1,369,976,400	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	36 Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37 paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	11,724,096	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,564,751	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37 paket		1,356,687,553	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								114,063,506	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga	Jumlah unit/pokmas/ormas pada Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	18 paket	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,487,228	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	Jumlah unit/pokmas/ormas pada Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	18 paket	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kelurahan	108,576,278	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1,683,161	
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 Laporan		1,683,161	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								71,769,583	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								71,769,583	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Kuta Selatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan		71,769,583	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								224,854,070	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								224,854,070	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63 orang	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 orang	Jumlah orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	63 orang		224,854,070	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								6,152,701	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								6,152,701	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	9 dokumen		1,238,109	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	Jumlah dokumen fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	9 dokumen		4,914,592	
TOTAL													21,134,812,726	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan		Target	Outcome Kegiatan			
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10,230,319,186	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,233,089	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,533,401	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,699,688	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								9,644,913,572	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,644,913,572	
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								143,569,629	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,846,150	
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	531,550	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	108,031,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,610,929	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,550,000	
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							49,561,908		
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,561,908	
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							12,177,198		
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,578,788	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,598,410	
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							372,863,790		
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	362,094,570	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 18 Unit	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,769,220	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								23,080,508	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								23,080,508	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	Persentase peserta yang memahami Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,574,366	
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Persentase peserta yang memahami Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,506,142	
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								66,884,606,850	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								66,884,606,850	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2 lembaga 5 partai politik 240 orang	Terlaksananya Pendidikan Politik dan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Peraturan PerundanganTerlaksananya Pendidikan Politik dan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Peraturan Perundangan serta Terwujudnya Laporan	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,876,121,683	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 Kabupaten Badung												
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik												
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik												
		Kode		Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target		
							Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Perkembangan Politik Daerah yang Rawan Konflik			

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung**

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Terlaksananya Pendidikan Politik dan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Peraturan PerundanganTerlaksananya Pendidikan Politik dan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik sesuai Peraturan Perundangan serta Terwujudnya Laporan Perkembangan Politik Daerah yang Rawan Konflik	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,485,167	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN								4,084,344	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								4,084,344	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Persentase jumlah ormas yang terdaftar	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,084,344	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								840,160,470	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								840,160,470	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185 Orang	Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN	100 %		136,510,499	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kabupaten Badung

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1200 orang	Persentase masyarakat yang difasilitasi mengikuti FKUB dan P4GN	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	703,649,971	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							388,049,752		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							388,049,752		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	Persentase terjadinya konflik sosial	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,319,469	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Persentase terjadinya konflik sosial	100 %	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	379,730,283	
TOTAL													78,370,301,110	

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.152.310.774.457	
4.1.01	Pajak Daerah	2.622.565.103.086	
4.1.02	Retribusi Daerah	84.955.833.150	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	183.378.818.853	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	261.411.019.368	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	722.493.352.446	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	570.495.945.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.997.407.446	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.874.804.126.903	
6	PEMBIAYAAN		
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	3.874.804.126.903	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase lumbung pangan yang dikelola dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LKjIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LKjIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang Terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)		
				Dinas Kesehatan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Kategori Kabupaten Layak Anak		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Kategori Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
			Cakupan Kerjasama Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indek Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indek Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LKjIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
				Inspektorat	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
			Inspektorat		
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Dinas Kebudayaan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
			Dinas Kebudayaan		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
			Dinas Kebudayaan		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
			Dinas Kebudayaan		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
			Dinas Kebudayaan		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan permukiman berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Persentase penanganan pasca bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Petang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Petang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Mengwi	
			Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Kuta Utara	
			Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	
			jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan unit dan pokmas/ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
			Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa		
				Kecamatan Petang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa		
				Kecamatan Petang	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Mengwi	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Kecamatan Kuta Utara	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Kuta Selatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		

Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
53	1. Pangan, Sandang dan Papan				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			Persentase lumbung pangan yang dikelola dengan baik		
				Dinas Pertanian dan Pangan	572.241.677
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.074.255.774
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	6.492.338
			Persentase (%) Desa Tahan Pangan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	18.355.818
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	32.416.962
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.899.743.411
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.124.497
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	113.977.796
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
			Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	138.122.565
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	344.716.995
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.644.360
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Pemberdayaan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	132.441.197
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Pengembangan UMKM		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	292.168.823

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu		
				Dinas Perikanan	10.868.211.826
			Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tepat Waktu		
				Dinas Perikanan	61.585.413
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Produksi Perikanan Tangkap		
				Dinas Perikanan	426.363.105
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Produksi Perikanan Budidaya		
				Dinas Perikanan	1.503.635.154
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari		
				Dinas Perikanan	45.363.387
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Produksi Olahan Hasil Perikanan		
				Dinas Perikanan	179.822.006
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai LKjIP		
				Dinas Pertanian dan Pangan	38.115.590.652

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	12.167.571.535
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Luas Tanam Padi		
				Dinas Pertanian dan Pangan	11.003.725.427
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	2.934.726.387
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
			% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulasi		
				Dinas Pertanian dan Pangan	423.955.930
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	1.759.488.106
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	108.643.579
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	69.954.165
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	531.095.392
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase Perlindungan terhadap Konsumen		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	487.788.454
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha		
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.987.650
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	346.399.436
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang Terdata di SIINas		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	150.709.665
54	2. Kesehatan dan Pendidikan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	426.037.335.767

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	350.644.098.775
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	18.786.082.325
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	155.908.619.194
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)		
				Dinas Kesehatan	1.495.000.000
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)		
				Dinas Kesehatan	893.124.517
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)		
				Dinas Kesehatan	1.008.714.081
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)		
				Dinas Kesehatan	1.027.457.201
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)		
				Dinas Kesehatan	1.265.852.688
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	553.812.281
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)		
				Dinas Kesehatan	1.920.687.562
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)		
				Dinas Kesehatan	1.550.445.536
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)		
				Dinas Kesehatan	2.390.663.773
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)		
				Dinas Kesehatan	1.343.177.418
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)		
				Dinas Kesehatan	1.097.972.222
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)		
				Dinas Kesehatan	798.960.083
			Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)		
				Dinas Kesehatan	839.560.000
			Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar		
				Dinas Kesehatan	190.589.204.849
			persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit		
				Dinas Kesehatan	180.812.938.120
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu		
				Dinas Kesehatan	1.273.430.746
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar		
				Dinas Kesehatan	329.491.664
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)		
				Dinas Kesehatan	1.482.114.082
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.649.021.862
			Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.077.385
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.171.355
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.684.912
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	218.164.446
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.134.432
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Kategori Kabupaten Layak Anak		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	121.382.148
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.533.963
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.269.715.009

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Persentase Kelompok kegiatan yang aktif		
				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.711.252
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.544.101.932
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	10.022.057.495
			Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	21.360.364.069
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional		
				Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	547.737.163
55	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial		
				Dinas Sosial	556.161.964
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial		
				Dinas Sosial	561.478.486
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial		
				Dinas Sosial	21.443.199.910
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana		
				Dinas Sosial	75.878.605
56	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Kebudayaan	15.662.238.822
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat		
				Dinas Kebudayaan	95.117.325.581
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni		
				Dinas Kebudayaan	17.290.573.366
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
			Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan	5.892.705.059
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi		
				Dinas Kebudayaan	21.715.120.401
			Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan		
				Dinas Kebudayaan	21.715.120.401
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)		
				Dinas Kebudayaan	1.365.749.814
57	5. Pariwisata				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	20.266.552
			Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.810.812.936
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	335.778.606
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	11.187.148.462
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	144.088.858
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	485.875.487
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	76.178.903
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.752.043
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	84.125.855
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	351.017.555
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase Terkelolanya Persampahan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	69.744.276.059
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran		
				Dinas Pariwisata	1.367.585.181
			Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)		
				Dinas Pariwisata	22.235.683.634
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Persentase DTW yang ditata		
				Dinas Pariwisata	8.996.167.239
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung		
				Dinas Pariwisata	5.851.784.022
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif		
				Dinas Pariwisata	111.273.270
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pariwisata	260.745.812
58	6. Penguatan Infrastruktur				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.833.830.344
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase luas sawah beririgasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.914.836.085
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.489.818
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.760.599.479
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.778.155
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.848.071.238

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase fasilitas publik berkondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.910.087.965
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase kondisi mantap jalan kabupaten		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.048.684.255
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	987.724.655
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	216.852.700
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	746.375.406
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.318.046
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.033.928.991
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	51.563.037.333
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan		
				Dinas Perhubungan	23.830.012.004
			Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)		
				Dinas Perhubungan	17.408.457
59	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	106.484.286.081
			Persentase pemenuhan urusan pemerintahan		
				Dinas Kesehatan	10.030.717
			Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.087.669.174
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase luas sawah beririgasi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.419.292
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.888.582.618
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.371.232.600
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Satuan Polisi Pamong Praja	29.553.718.818
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	33.306.488.060
			Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	880.526.814
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.415.166.586
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum		
				Satuan Polisi Pamong Praja	4.200.896.213
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase penanganan pasca bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114.838.864
			Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	326.428.006
			Persentase penanganan tanggap darurat bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.253.630.728
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	14.493.572.005
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Sosial	10.063.602.795
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
			Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	343.146.932
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	123.547.855
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	469.905.162
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	124.701.666
			Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	126.013.365
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)		
				Sekretariat Daerah	2.805.188
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)		
				Sekretariat Daerah	115.282.352
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
			Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)		
				Sekretariat Daerah	4.686.572
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.451.420.133
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Persentase kepemilikan dokumen kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.397.399.480
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.310.373.391
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase pemanfaatan data kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	276.956.059
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.201.480.009
		PROGRAM PENATAAN DESA			
			Cakupan Layanan Penataan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.235.948
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
			Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.786.892.824

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan		
				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.070.473.430
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	15.865.125.611
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	5.143.391.139
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	51.278.954.487
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.850.863.486
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	492.594.562
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	221.118.519
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.354.544.615
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.778.669
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		
				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.132.484.062
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.422.830.840

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indek Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	379.233.180
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77.539.547
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	489.351.207
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.396.920
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38.652.112
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	240.091.185
			Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanan		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12.468.366.187

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	137.198.377
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
			Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	102.607.231
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Sekretariat Daerah	66.572.627.425
			Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
				Sekretariat Daerah	107.898.787.532
			Persentase fasilitasi keprotokolan		
				Sekretariat Daerah	13.947.763.738
			Persentase OPD dengan Nilai PMPRB Katagori Baik (Organisasi)		
				Sekretariat Daerah	618.901.036

				Sekretariat Daerah	375.376.255
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
				Sekretariat Daerah	2.958.959.099

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Koordinasi/Rapat pelaksanaan Kerjasama Daerah		
				Sekretariat Daerah	237.843.048
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan		
				Sekretariat Daerah	3.195.036.867
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna (Bag. Adm. Pembangunan)		
				Sekretariat Daerah	778.376.096
			Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu		
				Sekretariat Daerah	149.984.103
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)		
				Sekretariat DPRD	18.228.430.230

				Sekretariat DPRD	42.887.617.745
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	30.090.622.414
			Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD		
				Sekretariat DPRD	29.965.901.078
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.262.952.692
			Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	202.087.410
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	704.643.551
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280.744.690
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	998.515.941
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.346.741.830
			Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.153.961.610
			Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	3.067.851.451

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.137.329.520
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	484.156.309.396
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.812.724.026
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
				Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	7.223.350.071
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.947.724.223
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.427.138.812
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.900.295.900
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	9.731.639.523
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		
				Badan Penelitian dan Pengembangan	3.547.991.672
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)		
				Inspektorat	21.428.103.073
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)		
				Inspektorat	651.689.555
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)		
				Inspektorat	850.641.457
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Kecamatan Petang	307.378.233
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Kecamatan Petang	12.834.417
			Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Petang	1.044.032.813
			Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Kecamatan Petang	7.908.126.137
			Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Kecamatan Petang	488.623.677
			Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		
				Kecamatan Abiansemal	11.448.827.497
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	3.675.011.769
			Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Mengwi	22.420.259.582
			Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Kecamatan Kuta Utara	15.164.238.897
			Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta	19.175.014.980
			Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Kecamatan Kuta Selatan	14.839.131.406
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
				Kecamatan Petang	4.958.675
			Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat		
				Kecamatan Petang	504.897.750
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Abiansemal	530.125.026
			Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
				Kecamatan Mengwi	5.052.478.349
			Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Mengwi	6.712.279
			Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Kuta Utara	4.608.774.325
			Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	504.949.062
			ZJumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		
				Kecamatan Kuta Utara	20.513.819
			0Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta	2.722.230.014
			Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kuta	856.760.297
			Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
				Kecamatan Kuta Selatan	4.578.993.403
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa		
				Kecamatan Petang	18.605.198
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Abiansemal	956.922.450

				Kecamatan Abiansemal	11.962.369
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Mengwi	1.350.611.130
			Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	105.451.729
			jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan unit dan pokmas/ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		
				Kecamatan Kuta Utara	105.451.729

				Kecamatan Kuta Utara	1.399.003.636

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			0Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Kuta	4.021.167
			Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Kuta	1.886.319.320
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
				Kecamatan Kuta Selatan	2.456.283.703
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Petang	122.878.408
				Kecamatan Abiansemai	22.484.760
				Kecamatan Mengwi	68.672.815
			jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum		
				Kecamatan Kuta Utara	25.112.972
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum		
				Kecamatan Kuta	60.838.798
			Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta		
				Kecamatan Kuta	60.838.798
			Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	309.080.703
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Kecamatan Petang	130.393.453
			Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Abiansemal	116.993.519
				Kecamatan Mengwi	132.024.612
			Jumlah orang pada program penyelenggaran pada urusan pemerintahan umum		
				Kecamatan Kuta Utara	231.276.425
			Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kuta	321.963.316
			Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
				Kecamatan Kuta Selatan	268.518.108
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
			Persentase fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bagian Tata Pemerintahan)		
				Sekretariat Daerah	358.165.035
			Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa		
				Kecamatan Petang	13.962.232
			Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Abiansemal	30.376.856
				Kecamatan Mengwi	19.374.693
			Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Kuta Utara	99.263.156
			Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Kecamatan Kuta Selatan	15.798.204
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.115.882.367
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.293.245
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66.887.251.537
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.393.890
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	479.825.332

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial		
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	391.860.250

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI						
		Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel					
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.555.413.498	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	426.037.335.767	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	350.644.098.775	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.544.101.932	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	10.022.057.495	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	547.737.163	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	15.865.125.611	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.143.391.139	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi dan Informatika	48.501.247.738	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional			
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	21.360.364.069	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
				Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2	KESEHATAN						
		Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	4.406.762.848	
		Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah					

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			
					Dinas Kesehatan	1.273.430.746	
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)			
					Dinas Kesehatan	1.482.114.082	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			
					Dinas Kesehatan	1.495.000.000	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)			
					Dinas Kesehatan	893.124.517	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)			
					Dinas Kesehatan	1.008.714.081	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)			
					Dinas Kesehatan	1.027.457.201	
				Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)			
					Dinas Kesehatan	1.265.852.688	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)			
					Dinas Kesehatan	553.812.281	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)			
					Dinas Kesehatan	1.920.687.562	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)			
					Dinas Kesehatan	1.550.445.536	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)			
					Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)			
					Dinas Kesehatan	1.343.177.418	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)			
					Dinas Kesehatan	1.097.972.222	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)			
					Dinas Kesehatan	798.960.083	
				Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)			
					Dinas Kesehatan	839.560.000	
				Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			
					Dinas Kesehatan	190.951.134.309	
		Terwujudnya Pemenuhan HAM					
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar			
					Dinas Kesehatan	329.491.664	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	125.270.368.406	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit			
					Dinas Kesehatan	180.812.938.120	
3	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER						
		Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat					
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				Total Fertility Rate (TFR)			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.533.963	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.269.715.009	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				
				Persentase Kelompok kegiatan yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.711.252	
		Menurunnya Angka Kemiskinan					
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana			
					Dinas Sosial	75.878.605	
		Terwujudnya Pemenuhan HAM					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.649.021.862	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Kategori Kabupaten Layak Anak			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	85.507.914	

			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial			
					Dinas Sosial	556.161.964	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial			
					Dinas Sosial	565.777.049	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Sosial	21.443.199.910	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	135.077.385	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	57.171.355	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				
				Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	246.684.912	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	218.164.446	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43.134.432	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Kecamatan Petang	16.487.313	
4	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN						
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB					
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata	5.851.784.022	
		Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Kebudayaan	15.662.238.822	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
				Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat			
					Dinas Kebudayaan	95.117.325.581	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
				Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni			
					Dinas Kebudayaan	17.290.573.366	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
				Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah			
					Dinas Kebudayaan	5.892.705.059	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi			
					Dinas Kebudayaan	21.715.120.401	
				Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan			
					Dinas Kebudayaan	21.715.120.401	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)			
					Dinas Kebudayaan	1.365.749.814	
		Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			
					Dinas Pariwisata	22.235.683.634	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase DTW yang ditata			
					Dinas Pariwisata	8.840.323.149	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif			
					Dinas Pariwisata	111.273.270	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
				Persentase lumbung pangan yang dikelola dengan baik			
					Dinas Pertanian dan Pangan	572.241.677	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian dan Pangan	3.074.255.774	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
				Persentase (%) Desa Tahan Pangan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	6.492.338	
				Persentase (%) Desa Tahan Pangan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	18.355.818	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
				Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	32.416.962	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu			
					Dinas Perikanan	10.868.211.826	
				Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tepat Waktu			
					Dinas Perikanan	61.585.413	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Produksi Perikanan Tangkap			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perikanan	426.363.105	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Perikanan	1.503.635.154	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari			
					Dinas Perikanan	45.363.387	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Produksi Olahan Hasil Perikanan			
					Dinas Perikanan	179.822.006	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Pariwisata	1.367.585.181	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Persentase DTW yang ditata			
					Dinas Pariwisata	280.286.099	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif			
					Dinas Pariwisata	793.781.498	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai LKjIP			
					Dinas Pertanian dan Pangan	38.109.256.766	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	12.167.571.535	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
				Luas Tanam Padi			
					Dinas Pertanian dan Pangan	11.003.725.427	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.934.726.387	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulasi			
					Dinas Pertanian dan Pangan	423.955.930	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.759.488.106	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	346.399.436	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Persentase IKM yang Terdata di SIINas			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	150.709.665	
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN						
		Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.833.830.344	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Persentase luas sawah beririgasi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.066.255.377	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.489.818	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.760.599.479	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.778.155	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				
				Persentase bangunan gedung berkondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.848.071.238	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				
				Persentase fasilitas publik berkondisi baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142.910.087.965	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kondisi mantap jalan kabupaten			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82.048.684.255	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				
				Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	987.724.655	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima Dan Berintegritas					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	51.563.037.333	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)			
					Dinas Perhubungan	17.408.457	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)			
					Sekretariat DPRD	3.615.138	

			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	216.852.700	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
				Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	926.449.968	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
				Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.318.046	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
				Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung			
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.033.928.991	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan			
					Dinas Perhubungan	23.835.686.424	
6	PEMBANGUNAN EKONOMI						

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			
					Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	107.068.468.813	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
				Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
					Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	7.191.452.823	
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	13.899.743.411	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase Pemberdayaan UMKM			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	132.441.197	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pengembangan UMKM			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	292.168.823	
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
				Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	108.643.579	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	69.954.165	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	531.095.392	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase Perlindungan terhadap Konsumen			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	487.788.454	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.987.650	
		Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat					
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	6.124.497	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
				Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	113.977.796	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				
				Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	138.122.565	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	344.716.995	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
				Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100.644.360	
7	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
		Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel					
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				
				Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)			
					Sekretariat Daerah	5.610.376	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
				Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)			
					Sekretariat Daerah	230.564.704	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				
				Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)			
					Sekretariat Daerah	9.373.144	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran			
					Sekretariat Daerah	133.145.254.850	
				Persentase OPD dengan Nilai PMPRB Katagori Baik (Organisasi)			
					Sekretariat Daerah	1.237.802.072	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu dan tepat guna (Bag. Adm. Pembangunan)			
					Sekretariat Daerah	1.556.752.192	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	404.174.820	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.409.287.102	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.997.031.882	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.895.448.446	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)			
					Inspektorat	1.483.069.918	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			
					Inspektorat	1.303.379.110	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Persentase fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bagian Tata Pemerintahan)			
					Sekretariat Daerah	716.330.070	
		Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			
					Dinas Kesehatan	307.430.536.974	
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	32.845.661.680	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	155.079.094	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	978.702.414	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	74.793.840	
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				
				Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	77.304.224	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.065.314.558	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.379.036.272	
		Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.087.669.174	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.888.582.618	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.482.070.374	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
					Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	31.897.248	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada					
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta			
					Kecamatan Kuta	60.838.798	
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu			
					Sekretariat Daerah	149.984.103	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima Dan Berintegritas					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	33.306.488.060	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	14.493.572.005	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			
					Sekretariat Daerah	2.958.959.099	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)			
					Sekretariat DPRD	1.907.947	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			
					Sekretariat DPRD	27.614.535.091	
		Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.115.882.367	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	39.293.245	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	479.825.332	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	391.860.250	
		Terwujudnya Pemenuhan HAM					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.215.200	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Produk Hukum Daerah yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan			
					Sekretariat Daerah	3.195.036.867	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.518.070.663	
				Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Sosial	10.063.602.795	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	343.146.932	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	123.547.855	
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	469.905.162	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	124.701.666	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	126.013.365	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				
				Persentase kepemilikan dokumen kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.397.399.480	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL				
				Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.310.373.391	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
				Persentase pemanfaatan data kependudukan			
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	276.956.059	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.201.480.009	
			PROGRAM PENATAAN DESA				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Layanan Penataan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.235.948	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
				Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.786.892.824	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.070.473.430	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.850.863.486	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	492.594.562	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	221.118.519	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.354.544.615	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.778.669	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.132.484.062	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Indek Pembangunan Literasi Masyarakat			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	379.233.180	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	240.091.185	
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	12.468.366.187	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	137.198.377	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha			
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	102.607.231	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					Sekretariat Daerah	107.898.787.532	
				Persentase fasilitasi keprotokolan			
					Sekretariat Daerah	13.947.763.738	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Sekretariat Daerah	375.376.255	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Persentase Koordinasi/Rapat pelaksanaan Kerjasama Daerah			
					Sekretariat Daerah	237.843.048	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Jumlah produk kebijakan yang dihasilkan SDA			
					Sekretariat Daerah	399.321.088	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)			
					Sekretariat DPRD	18.222.907.145	

					Sekretariat DPRD	43.091.080.745	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			
					Sekretariat DPRD	32.991.934.038	
				Tingkat Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			
					Sekretariat DPRD	2.351.365.987	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.262.952.692	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
				Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280.744.690	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.346.741.830	
				Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.150.836.157	

					Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	1.137.329.520	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				
				Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	484.156.309.396	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				
				Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah			
					Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.812.724.026	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah			
					Badan Penelitian dan Pengembangan	9.776.294.319	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan			
					Badan Penelitian dan Pengembangan	3.547.991.672	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)			
					Inspektorat	850.641.457	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
					Kecamatan Petang	290.890.920	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
					Kecamatan Petang	12.834.417	
				Jumlah Orang dan Dokumen pada Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
					Kecamatan Petang	1.044.032.813	
				Jumlah Orang pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
					Kecamatan Petang	7.908.126.137	
				Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					Kecamatan Petang	488.623.677	
				Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
					Kecamatan Abiansemal	11.448.827.497	
				Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Mengwi	3.675.011.769	
				Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit ProgramPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Mengwi	22.420.259.582	
				Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota			
					Kecamatan Kuta Utara	15.164.238.897	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta	19.799.733.029	

					Kecamatan Kuta	246.078.427	
				Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
					Kecamatan Kuta Selatan	14.839.131.406	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
				Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					Kecamatan Petang	4.958.675	
				Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat			
					Kecamatan Petang	504.897.750	
				Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Abiansemal	530.125.026	
				Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat			
					Kecamatan Mengwi	5.052.478.349	
				Jumlah Laporan dan Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Mengwi	6.712.279	
				Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Kuta Utara	525.462.881	
				Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Kuta Utara	504.949.062	
				ZJumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			
					Kecamatan Kuta Utara	20.513.819	
				0Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kuta	2.722.230.014	
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kuta	856.760.297	
				Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
					Kecamatan Kuta Selatan	4.578.993.403	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa			
					Kecamatan Petang	983.076.517	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Abiansemal	956.922.450	

					Kecamatan Abiansemal	11.962.369	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Mengwi	1.350.611.130	
				Jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan, unit dan pokmas atau ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Kuta Utara	105.451.729	
				jumlah paket lembaga kemasyarakatan, laporan unit dan pokmas/ormas pada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			
					Kecamatan Kuta Utara	105.451.729	

					Kecamatan Kuta Utara	1.399.003.636	
				0Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta	4.021.167	
				Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta	1.893.401.304	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
					Kecamatan Kuta Selatan	2.456.283.703	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Petang	122.878.408	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Abiansemal	22.484.760	
					Kecamatan Mengwi	68.672.815	
				jumlah laporan pada program Koordinasi Ketentraman dan Ketrtiban Umum			
					Kecamatan Kuta Utara	25.112.972	
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
					Kecamatan Kuta	60.838.798	
				Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Kecamatan Kuta Selatan	309.080.703	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
				Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
					Kecamatan Petang	130.393.453	
				Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Abiansemal	116.993.519	
					Kecamatan Mengwi	132.024.612	
				Jumlah orang pada program penyelenggaran pada urusan pemerintahan umum			
					Kecamatan Kuta Utara	231.276.425	
				Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Kuta	321.963.316	
				Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
					Kecamatan Kuta Selatan	268.518.108	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
				Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa			
					Kecamatan Petang	13.962.232	
				Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Abiansemal	30.376.856	
					Kecamatan Mengwi	19.374.693	
				Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			
					Kecamatan Kuta Utara	99.263.156	
				Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
					Kecamatan Kuta Selatan	15.798.204	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	66.887.251.537	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan			
					Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.393.890	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP						
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	39.810.812.936	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	335.778.606	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
				Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	144.088.858	
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				
				Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	76.178.903	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	86.752.043	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	84.125.855	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase Terkelolanya Persampahan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	69.744.276.059	
		Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	11.187.148.462	
		Terwujudnya Pemenuhan HAM					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
				Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	485.875.487	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	351.017.555	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	20.266.552	
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah			
					Satuan Polisi Pamong Praja	29.553.718.818	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum			
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.200.896.213	

Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	880.526.814	
				Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.450.266.586	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase penanganan pasca bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	114.838.864	
				Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	326.428.006	
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.253.630.728	

Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)	100 %	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKjIP	77.62 nilai	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Badung	
							1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kab. Badung	
							1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kab. Badung	
							1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kab. Badung	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3309 Orang/bulan	Kab. Badung	
				1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	Kab. Badung	
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	100 %	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							1.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung		
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Badung		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung		
						1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	Kab. Badung		
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	Kab. Badung		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	100 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	100 %	1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 unit	Kab. Badung	
						1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7 unit	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 paket	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	249 paket	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	246 paket	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 unit	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2000 unit	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	416 Peserta Didik	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	298 Satuan Pendidikan	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	271 Satuan Pendidikan	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2542 Orang	Semua Kab/Kota		
						1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	271 Satuan Pendidikan	Kab. Badung		
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	271 Satuan Pendidikan	Kab. Badung		
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	100 %	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 unit	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 2 Ruang Telah Dibangun		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1 Ruang Dibangun		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 6 Ruang Dibangun		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 9 unit yang Telah Dibangun		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 paket		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang 28 paket Tersedia		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 28 paket		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang 10 Unit Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 10 Unit Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah 85 Peserta Pertama yang Menerima Biaya Personil Didik Peserta Didik		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah 55 Satuan Pertama yang Siap Dievaluasi dan Pendidikan Melaksanakan Rekomendasi		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga 1064 Orang Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50 Orang yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama 55 Satuan yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan		Kab. Badung	
							1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama 55 Satuan yang Mengelola Dana BOS Pendidikan		Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	100 %	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	Kab. Badung	
							1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	357 Paket	Kab. Badung	
							1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	553 Peserta Didik	Kab. Badung	
							1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	Kab. Badung	
							1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	28 Orang	Kab. Badung	
							1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	357 Satuan Pendidikan	Kab. Badung	
				1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	100 %	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan	Kab. Badung	
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	82.4 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	Kab. Badung	
							1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Kab. Badung		
				Persentase pelaporan yang tepat waktu	100 %		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	750 orang/bulan			
				Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %		Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit	100 %			
						1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	Kab. Badung		
						1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	Kab. Badung		
			1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 laporan	Kab. Badung		
			1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Kab. Badung		
						1.02.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	Kab. Badung		
						1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 orang	Kab. Badung		
			1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	Kab. Badung		
						1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 paket	Kab. Badung		
						1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 dokumen	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	Kab. Badung		
						1.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dokumen	Kab. Badung		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 % 100 %	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan mebelair utk gedung rumah sakit	100 %	Kab. Badung		
						1.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di rumah sakit	100 % 100 %	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Kab. Badung		
						1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit	0 Laporan 12 laporan 100 %	Kab. Badung		
						1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	0 Laporan 12 laporan 100 %	Kab. Badung		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 unit	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	Kab. Badung	
				1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 unit kerja	Kab. Badung	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 unit	Kab. Badung	
		persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %		Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	100 %					
					Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)		1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 unit	Kab. Badung	
							1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 unit	Kab. Badung	
								Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit		
								persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %		
							1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	Kab. Badung	
								persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit	100 %		
							1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung	
								Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 unit		
								persentase pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang medik rs	100 %		
							1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
								persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit	100 %		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	39 paket	Kab. Badung		
						1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	11 unit	Kab. Badung		
						1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1383 unit	Kab. Badung		
						1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	168 paket	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas pencapaian kinerja BLUD 81 % RSD Mangusada Perentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan disesuaikan standar Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan di sesuai dengan standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan di sesuai standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP rujukan disesuaikan standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai Standar Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar Presentase Ketersediaan Layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di Sesuai Standart	12 Dokumen	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11040 orang	Kab. Badung			
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10538 orang	Kab. Badung			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10036 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33048 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93280 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Masyarakat usia produktif (15- 59 tahun) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	330317 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34467 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8054 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3029 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapat Pelayanan kesehatan sesuai standar	624 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	546 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15138 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	0 Dokumen 5 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen 52 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 orang 0 Orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang yang dilakukan skrining orang dengan masalah kesehatan (ODMK) jiwa	3656 orang	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	381 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	202 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1000 orang	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 Paket Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 28 paket		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2 dokumen		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.31 Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen penelitian kesehatan 1 dokumen		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit 81 %		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 12 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 0 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 473 dokumen Jumlah dokumen operasional puskesmas 12 dokumen		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 13 unit		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 dokumen		Kab. Badung		
						1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 0 dokumen		Kab. Badung		
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) 100 %		1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 0 dokumen		Kab. Badung		
						1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 132 dokumen		Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)	100 %	1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	0 unit	Kab. Badung	
							1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit 13 unit	Kab. Badung	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang berkompeten sesuai kualifikasi untuk Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2300 dokumen	Kab. Badung	
				1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25 orang	Kab. Badung	
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	Kab. Badung	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 dokumen	Kab. Badung	
							1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 sarana	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.04.2.01.03 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	0 sarana	Kab. Badung		
			1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	70 dokumen	Kab. Badung		
			1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 dokumen	Kab. Badung		
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100 %	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	26 unit 0 Unit	Kab. Badung		
						1.02.04.2.06.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	0 dokumen	Kab. Badung		
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 dokumen	Kab. Badung	
				1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)	100 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 dokumen	Kab. Badung	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)	100 %	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kab. Badung	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	Kab. Badung	
							1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung	
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kab. Badung	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	0 Dokumen	Kab. Badung	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Paket	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	
							1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung	
				1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung	
							1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Kab. Badung	
				1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	103 unit	Kab. Badung		
						1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	38 Unit			
						1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung		
						1.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah beririgasi	96.55 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi bendungan ,danau dan bangunan penampung air lainnya	1 Dokumen	Kab. Badung		
						1.03.02.2.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung		
						1.03.02.2.01.34 Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	0.3 km			
						1.03.02.2.01.47 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	8 Unit			
						1.03.02.2.01.54 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.9 km			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 unit		
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	8 Dokumen		
							1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.15 KM	Kab. Badung	
							1.03.02.2.02.08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	4.2 km		
							1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2.5 km		
							1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.5 km		
							1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	20 Bendung		
							1.03.02.2.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	27 Dokumen		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	96.1 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	4 Dokumen		
							1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Optimalisasi SPAM	2 Dokumen		
							1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1250 Liter/detik		
							1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	400 SR		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	74 %	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.04.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		
							1.03.04.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.04.2.01.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	300 Rumah Tangga		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	97,4 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman berkategori baik	100 %	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18 Sistem Jaringan		
							1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Sistem Jaringan		
							1.03.07.2.01.04 Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 orang		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung berkategori baik	100 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	1 Dokumen		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik	100 %	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	10 Dokumen		
							1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	15 Kawasan		
							1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	15 Kawasan		
							1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Badung	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	98.95 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen		
							1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	11727 m2		
							1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen			
						1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6.4 Km 0 KM			
						1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5.8 Km			
						1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	881.945 Km			
						1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	13 M			
						1.03.10.2.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	2 Buah			
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1582.27 m			
						1.03.10.2.01.23 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	7 Dokumen			
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik	100 %	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	30 orang			
						1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	30 Orang			
						1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2 Dokumen			
				1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.03.11.2.02.01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	4 Laporan			
						1.03.11.2.02.04 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	2 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	12 Dokumen		
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan	100 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
				1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
							1.03.12.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		
							1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen		
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen		
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100 %	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung	
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	Kab. Badung	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	Kab. Badung	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung		
			1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung		
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung		
						1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
						1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung		
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung		
						1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	12 Dokumen	Kab. Badung	
				1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten yang Terehabilitasi	300 unit	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	300 Unit Rumah	Kab. Badung	
							1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit Rumah		
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %	1.04.02.2.06.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Dokumen		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh	100 %	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman	100 %	1.04.03.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	6 Laporan	Kab. Badung	
			1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %		1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	6 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.03.2.02.04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	6 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
							1.04.03.2.02.06 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	0 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.03.2.02.07 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				
							1.04.03.2.02.08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	0 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.02.09 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	100 %	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	18.83 Ha	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	6 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.03.2.03.08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	0 Unit 10 Unit	Kab. Badung	
	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah 300 Unit Rumah	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	Kab. Badung	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase Psu Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	100 %	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	12 Dokumen	Kab. Badung	
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	24 Lokasi	Kab. Badung	
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	12 Laporan		
							1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	12 Laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
							1.04.05.2.01.05 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	12 Dokumen 0 Dokumen		
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	100 % 100 % 100 %	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 % 100 %	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 3 Dokumen 3 dokumen	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan 0 Laporan 1 laporan 2 Laporan	Kab. Badung		
						1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen 4 Laporan	Kab. Badung		
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 orang 186 Orang/bulan 193 Orang	Kab. Badung		
			1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD	100 %	1.05.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kab. Badung		
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket 1 Paket	Kab. Badung		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket 1 Paket 11 Paket	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket 11 Paket	Kab. Badung		
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket 2 Paket 5 Paket	Kab. Badung		
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 1 Paket	Kab. Badung		
						1.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	413 eksemplar 3 Dokumen 708 Dokumen	Kab. Badung		
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan 0 Laporan 1 Laporan	Kab. Badung		
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	Kab. Badung		
						1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit 5 Unit 10 Unit	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit sarana dan prasarana gedsung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit 0 Unit	Kab. Badung	
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penydiaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 100 % 100 %		1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laopran penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 1 Laporan 4 Laporan	Kab. Badung	
							1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan 3 Laporan 12 Laporan	Kab. Badung	
							1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan 1 Laporan 5 Laporan	Kab. Badung	
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 % 100 %		1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 kendaraan 46 Unit 53 Unit	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 53 unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 unit Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit		Kab. Badung	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum 90 %	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 90 %			1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 1800 kasus			
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 60 kasus			
							1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/kota 24 dokumen			
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 Dokumen Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 31 dokumen			
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 487 orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24 dokumen			
						1.05.02.2.01.07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	792 unit			
						1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 dokumen			
			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 laporan			
						1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	24 laporan			
						1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	90 laporan			
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	100 %	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1 laporan			
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pra bencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan prabencana, penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	0 Orang	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan pra bencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang diilegalisasi	1 dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	2 kawasan	Kab. Badung	
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDNB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi perjenis kejadian bencana	25 orang	Kab. Badung	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 orang	Kab. Badung	
				1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	1.05.03.2.04.01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen tatakelola kelembagaan bencana daerah	0 dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.04.03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dam kemitraan dalam penanggulangan bencana	1 dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.04.04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah data dan informasi kebencanaan	1 dokumen	Kab. Badung	
							1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	penyelenggaraan penanggulangan bencana	0 laporan	Kab. Badung	
							1.05.03.2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	jumlah penanganan dokumen pasca bencana kabupayten/kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P)	4 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	96 %	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	100 %	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	Kab. Badung	
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung	
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Kab. Badung	
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	10 Unit	Kab. Badung	
							1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	Kab. Badung	
				1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran yang diperiksa	100 Objek	1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	100 Dokumen	Kab. Badung	
				1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	1 Dokumen	1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	1 Dokumen	Kab. Badung	
				1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	12 Desa/Kelurahan	Kab. Badung	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	Kab. Badung	
							1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Kab. Badung	
							1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	Kab. Badung	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 orang	Kab. Badung	
				1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	Kab. Badung	
							1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	Kab. Badung	
							1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Kab. Badung	
				1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kab. Badung		
						1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	Kab. Badung		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	Kab. Badung		
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit			
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kab. Badung		
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial	100 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25 keluarga		
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga			
						1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 lembaga			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115 orang		
						1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang			
						1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang		
							1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang		
				1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100 %	1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang		
							1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5 dokumen		
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial	100 %	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	100 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	1978 orang		
							1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1978 keluarga		
							1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24760 keluarga		
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang		
							1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	100 %	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung		
							1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang		
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	23 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	23 %	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 makam (monumen)		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	100 %	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	1 Dokumen	2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20 Perusahaan		
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Bidang Pariwisata dan Sektor lainnya	5 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja/Magang yang Meningkatkan Kualitasnya untuk dapat Mengisi Lowongan Pekerjaan dan Jumlah LPKS yang Meningkatkan Kualitasnya dan Berdaya Saing Melalui Pemberian Pelatihan Kepada Pengurus/Pengelola LPKS dengan Penerapan Standarisasi Mutu LPKS	30 LPK	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	215 Orang		
							2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun 2023	43 LPK		
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	27 %	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Meningkatkan Kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan	105 orang	2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	15 Orang		
				2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Memperoleh Informasi Lowongan Kerja dan Pelayanan AK 1	1300 Orang	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IMTA Perpanjangan yang Diterbitkan	130 IMTA	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing Pendatang Yang Mendapatkan Pembinaan	120 Perusahaan		
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Sekala Upah dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	21.03 %	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	5111 orang	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan		
							2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		
				2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	62 %	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	60 Perkara		
							2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100 %	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Kab. Badung	
							2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	Kab. Badung	
							2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Administrasi Keuangan	100 %	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	Kab. Badung	
							2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55 dokumen	Kab. Badung	
							2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	Kab. Badung	
							2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan 15 laporan	Kab. Badung	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang berjalan dengan baik	100 %	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	472 dokumen	Kab. Badung	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Peyelenggaraan Rapat Koodinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 6 laporan	Kab. Badung	
				2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kab. Badung	
							2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung		
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 %	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yag Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 unit	Kab. Badung		
						2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Kab. Badung		
						2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kab. Badung		
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif	75 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	100 %	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Badung	
						2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	Kab. Badung		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah			
			2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran peserta dalam sosialisasi	100 %	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan	100 %	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang dapat dicegah	100 %	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Badung	
							2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Pelindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung	
				2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat layanan rujukan lanjutan	100 %	2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	Kab. Badung	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif	100 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga pada Peserta Sosialisasi	100 %	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Infomasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Kab. Badung	
				2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan bagi keluarga	100 %	2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 layanan	Kab. Badung	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender yang telah melewati proses pengumpulan dan dianalisis	50 buku	2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	50 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori Nindya	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA yang mendukung penilaian Kabupaten Layak Anak	100 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemeintah, Non Pemeintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organiasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	4 organisasi	Kab. Badung	
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Kab. Badung	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya keaktifan lembaga Forum Anak Daerah	100 %	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	500 orang	Kab. Badung	
							2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkonisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen komunikasi Infomasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hldup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan	100 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan kasus kekerasan terhadap anak	100 %	2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya layanan 100 % bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus		2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 0 Layanan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 6 layanan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Badung	
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase lumbung pangan yang dikelola 100 % dengan baik		2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang 1 Unit dimanfaatkan		2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 1 Unit		Kab. Badung	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 100 %		2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras 50627.16 Ton		2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 1 Laporan		Kab. Badung	
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang 5 Laporan Tersedia		Kab. Badung	
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 6 Unit		Kab. Badung	
				2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Cadangan Pangan 100 % yang dikelola dengan baik		2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 40 Ton		Kab. Badung	
				2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun 7 Kelompok		2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 4 Laporan		Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan	93 %	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutahirkan	15 Dokumen	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Kab. Badung	
				2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	1 Laporan	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Badung	
							2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	4 Komoditi	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	3 Kelompok	2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Sertifikat	Kab. Badung	
							2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	Kab. Badung	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pengelolaan Tanah Kosong (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %	2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong	1 Dokumen	Kab. Badung	
				2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	100 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlag dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	33 dokumen	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	Kab. Badung		
							2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		
							2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	Kab. Badung		
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	265 orang/bulan	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 bulan 265 orang	Kab. Badung		
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket kegiatan administrasi umum	7 paket	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung		
							2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin 1 unit lainnya yang tersedia		2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Kab. Badung	
				2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	
				2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah 234 unit Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	94 Unit	Kab. Badung	
							2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104 Unit	Kab. Badung	
							2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit		
							2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kab. Badung	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Badung	5 dokumen	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air , Udara dan Laut	4 Dokumen		
							2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanggulanagn pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	12 laporan	2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	12 Laporan			
			2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	12 dokumen	2.11.03.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	12 Dokumen			
						2.11.03.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	12 Dokumen			
						2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	12 Dokumen			
	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	10.689519 Ha	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	10.689519 Ha		
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	150 Laporan		
			2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Limbah B3 dalam 1 (satu)	12 laporan	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	12 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin pplh terbit oleh pemerintah Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	27 dokumen 12 laporan	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	12 Laporan		
							2.11.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	15 Dokumen		
	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	100 %	2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	10 dokumen	2.11.07.2.02.01 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	10 Dokumen		
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	3 lembaga	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	100 Lembaga		
							2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	24 Dokumen		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	50 Entitas		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	24 dokumen	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12 Dokumen		
							2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	12 Dokumen		
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase terkelolanya sampah	100 %	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Persentase Pengurangan Sampah yang Dilakukan dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	27 %		
							2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota	72 %		
							2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	18 Kelompok		
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 dokumen	Kab. Badung	
							2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	Kab. Badung	
							2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan 0 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/bulan 0 Orang/bulan	Kab. Badung		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi perangkat daerah	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket 0 Paket	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket 0 Paket	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket 0 Paket	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket 0 Paket	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	Kab. Badung		
						2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 laporan 0 Laporan	Kab. Badung		
						2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit mobil 0 Unit	Kab. Badung		
						2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit mobil 13 unit sepeda motor	Kab. Badung		
						2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	216 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, pemuktahiran KK, dan cetak KIA	62 desa	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
						2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pendaftaran penduduk	0 Dokumen 3 dokumen	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang 62 desa		2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	jumlah dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penduduk dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk 6 dokumen		Kab. Badung	
					Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update data lahir, mati, pindah, datang 62 desa/kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Dokumen			
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan 100 %		2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 0 Dokumen		Kab. Badung	
								jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting 10 dokumen			
							2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5 layanan		Kab. Badung	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	50 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun 62 desa		2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan 2 dokumen		Kab. Badung	
					Jumlah desa informasi administrasi kependudukan yang tersusun 62 desa/kelurahan			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 0 Dokumen			
							2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah 3 laporan		Kab. Badung	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah data/kelurahan yang tersedianya pengeloalan data SIAK 62 desa		2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah dokumen hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat 6 dokumen		Kab. Badung	
								Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 Laporan			
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100 %	2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja	100 %	2.13.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 6 dokumen	Kab. Badung	
							2.13.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung	
				2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 orang/bulan	Kab. Badung	
				2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.13.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.13.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.13.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.13.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	Kab. Badung	
				2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Badung	
				2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.13.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.13.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	
				2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.13.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.13.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit mobil		Kab. Badung	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit sepeda motor			
						2.13.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Semua Kab/Kota Kab. Badung	
						2.13.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit		Kab. Badung	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa	100 %	2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	100 %	2.13.02.2.01.02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	1 desa	Kab. Badung	
	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Cakupan Kerjasama Desa	100 %	2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa	46 Desa	2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	46 dokumen	Kab. Badung	
							2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	46 dokumen	Kab. Badung	
							2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	46 dokumen	Kab. Badung	
							2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen Profil Desa	46 dokumen	Kab. Badung	
							2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	46 Dokumen	Kab. Badung	
							2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46 dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	46 Desa	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	Kab. Badung	
							2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 laporan	Kab. Badung	
							2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	46 laporan	Kab. Badung	
							2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	Kab. Badung	
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)	2,10 %	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kehadiran peserta sosialisasi masalah kependudukan	100 %	2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	3 dokumen	Kab. Badung	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya laporan PUS serta kesertaan ber-KB	100 %	2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 dokumen	Kab. Badung	
							2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif	79 %	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Advokasi Komunikasi KIE	100 %	2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 organisasi	Kab. Badung	
							2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0 Dokumen	Kab. Badung	
								Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	12 dokumen		
							2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	Kab. Badung	
								Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	6 unit		
							2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 dokumen	Kab. Badung	
							2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	9 laporan		
							2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 laporan	Kab. Badung	
			2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB dan PLKB yang aktif	100 %		2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	642 Organisasi	Kab. Badung	
							2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 laporan	Kab. Badung	
							2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan kader Institusi Masyarakat pedesaan (IMP)	955 orang	Kab. Badung	
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan alat kontrasepsi di semua faskes	100 %		2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	Kab. Badung	
							2.14.03.2.03.02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	380 Orang	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP 3927 orang Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 0 Orang		Kab. Badung	
							2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 laporan		Kab. Badung	
							2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 0 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduski di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 3000 orang		Kab. Badung	
							2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1000 laporan		Kab. Badung	
				2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam berKB 100 %		2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 12 kampung		Kab. Badung	
							2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 12 laporan		Kab. Badung	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif	100 %	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase POKTAN yang dibina 100 %		2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 laporan		Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase POKTAN yang aktif	100 %	2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 laporan	Kab. Badung		
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung		
						2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung		
						2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung		
				2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/Bulan	Kab. Badung		
						2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	Kab. Badung		
						2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kab. Badung		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan			
						2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kab. Badung	
							2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	
				2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Badung	
							2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
							2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan	Kab. Badung	
				2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	Kab. Badung	
							2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 unit	Kab. Badung	
							2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
							2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	713 unit		
							2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	4500 unit		
				2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	21000 unit		
							2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	7 unit		
				2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.06.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		
							2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	45 unit		
							2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan		
				2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			2.15.02.2.08.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 Laporan		
							2.15.02.2.08.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	13 Laporan		
							2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	18 Laporan		
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	Kab. Badung	
				2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74 Dokumen	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 orang/bulan 0 Orang/bulan	Kab. Badung	
							2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	43 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.16.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	Kab. Badung		
						2.16.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Badung		
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	33 Laporan	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangabn Bangunan Kantor yabng Disediakan	2 Paket	Kab. Badung		
						2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Badung		
						2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung		
						2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
						2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung		
						2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kab. Badung		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 Unit	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	113 Unit	Kab. Badung		
						2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	46 Unit	Kab. Badung		
			2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Laporan	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34 Unit	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Kab. Badung	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk emflementasi adopsi teknologi digital dan layanan literasi digital yang difasilitasi Pemerintah Daerah	100 %	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 Dokumen	2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	36 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Kab. Badung	
							2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	10 Dokumen	Kab. Badung		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi di Kabupaten Badung	100 %	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain Yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 Dokumen	2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2 Domain	Kab. Badung	
						2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung		
						2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1010 Unit	Kab. Badung		
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41 Dokumen	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung	
						2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	5 Unit	Kab. Badung		
						2.16.03.2.02.08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 Layanan	Kab. Badung		
						2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	12 Dokumen	Kab. Badung		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)	100 %	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Junlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung	
			2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		Kab. Badung	
			2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung	
						2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung	
						2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		Kab. Badung	
						2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		Kab. Badung	
						2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	396 Dokumen		Kab. Badung	
						2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	4 Laporan		Kab. Badung	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		Kab. Badung	
						2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Kab. Badung	
						2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		Kab. Badung	
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	terlaksananya Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	Kab. Badung		
						2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	126 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Diterbitkan	60 Unit Usaha	2.17.02.2.01.01 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	60 Unit Usaha	Kab. Badung	
				2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin yang Diterbitkan	5 Unit Usaha	2.17.02.2.02.01 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wlayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang difasilitasi	5 Unit Usaha	Kab. Badung	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang taat Aturan	138 Unit Usaha	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Unit Usaha	Kab. Badung	
							2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Pereturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Unit Usaha	Kab. Badung	
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100 %	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi	160 Unit Usaha	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	160 Unit Usaha	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha 160 Unit Usaha			
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian	100 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Diberikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	347 orang	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	347 Orang	Kab. Badung	
	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	20 Unit Usaha	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Unit Usaha	Kab. Badung	
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	572 Unit Usaha	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	372 Unit Usaha	Kab. Badung	
						2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	5 Unit Usaha	Kab. Badung		
						2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	Kab. Badung		
						2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	Kab. Badung		
						2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	30 Orang	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	100 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro bagi UMKM	600 Unit Usaha	2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	600 Unit Usaha	Kab. Badung	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPPTSP	100 %	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	Kab. Badung	
							2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kab. Badung	
							2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85 Laporan	Kab. Badung	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/Bulan	Kab. Badung	
							2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPPTSP	100 %	2.18.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kab. Badung	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket Jasa THL 1 Paket Bahan Logistik	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket Laporan 1 Paket Cetak	Kab. Badung	
							2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Badung	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
				2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	100 %	2.18.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung	
							2.18.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	164 Unit	Kab. Badung	
				2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung	
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung	
				2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit Mobil 28 Unit Motor	Kab. Badung	
							2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Kebijakan Iklim Penanaman Modal	100 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	100 %	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	Kab. Badung	
							2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	15 Kegiatan Usaha	Kab. Badung	
				2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %	2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
							2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100 %	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	100 %	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal	100 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6000 Pelaku Usaha	Kab. Badung	
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan Usaha	Kab. Badung	
							2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	35 Orang	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15 Kegiatan Usaha	Kab. Badung		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	100 %	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 PMA/PMDN	Kab. Badung	
						2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 PMA/PMDN	Kab. Badung		
						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	300 PMA/PMDN	Kab. Badung		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	100 %	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	16 Dokumen	Kab. Badung	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	200 Orang	Kab. Badung	
						2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	70 Orang	Kab. Badung		
				2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Pemuda pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	100 %	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	2 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	26 Unit	Kab. Badung	
				2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	100 %	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	
							2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	166 Orang	Kab. Badung	
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlit pada Tingkat Provisni dan atau Nasional	100 %	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1807 orang	Kab. Badung	
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	100 %	2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 Unit	Kab. Badung	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	100 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pe]mbinaan dan Pengemba]ngan Kepramukaan	100 %	2.19.04.2.01.07 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	1 Unit	Kab. Badung	
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	100 %	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	15 Dokumen	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan ,Pengolahan,Analisis dan Desiminasi Data Statistik Sektoral	8 dokumen	Kab. Badung	
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasin	47 Orang	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang 3 Dokumen Dihimpun	Kab. Badung			
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengelolaan layanan keamanan Sistem pemeritahan berbasis elektronik	100 %	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16 Dokumen	2.21.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkani	4 Dokumen	Kab. Badung	
							2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kab. Badung	
							2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	Kab. Badung	
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasin	38 PD	Kab. Badung	
				2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota	4 Dokumen	2.21.02.2.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38 PD	Kab. Badung	
	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
	2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Kab. Badung	
							2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LKjIP, IKU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	Kab. Badung	
				2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang	Kab. Badung	
				2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						2.22.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600 dokumen	Kab. Badung		
						2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	Kab. Badung		
			2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.22.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	Kab. Badung		
						2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	Kab. Badung		
			2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kab. Badung		
						2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kab. Badung		
						2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung		
			2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit 22 unit	Kab. Badung		
						2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 unit yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Badung	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100 %	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 0 Objek Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 592 Objek			
							2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan 592 Orang Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 Orang			
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 0 Objek Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 3343 Objek		Kab. Badung	
							2.22.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang yang diberikan Penghargaan dalam Pemajuan Kebudayaan 25 Sertifikat			
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.02.2.03.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 12 Objek Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 0 Objek			
							2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat yang dibina 1525 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 0 Orang		Kab. Badung	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	36 %	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.22.03.2.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan 720 Orang Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 0 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	22 sertifikat		
							2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	182 lembaga 0 Lembaga		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	25 %	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.22.04.2.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang di berdayakan Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1991 Orang 0 Orang	Kab. Badung	
							2.22.04.2.01.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	401 unit	Kab. Badung	
							2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Masyarakat Sejarah yang dapat Diakses Masyarakat Jumlah Dokumen Data dan Informasi Masyarakat Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	170 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	10 Unit 3 Unit	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek diduga Cagar Budaya yang didaftarkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	92 Objek 0 Objek	Kab. Badung	
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	17 Objek 0 Objek	Kab. Badung	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	218 Objek 0 Objek		
							2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	46 Objek	Kab. Badung	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 Unit	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit 0 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit		
								Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	0 Unit		
							2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 Unit		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	0 Unit		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100 %	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung	
							2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kab. Badung	
							2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Kab. Badung	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	Kab. Badung	
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Badung	
							2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Badung	
							2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	Kab. Badung	
							2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung	
				2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Badung	
							2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Badung	
				2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barng milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	Kab. Badung	
							2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	8,85 Nilai Indek	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	4790 Orang	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	36 Layanan	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	0 Perpustakaan	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	0 Layanan	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	0 Eksemplar	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1500 Eksemplar	Kab. Badung	
							2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Badung	
				2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59.22 Nilai	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus	Kab. Badung	
							2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang	Kab. Badung	
							2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	2 Perpustakaan	Kab. Badung	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan	25 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang didaftarkan dan dirawat	30 Naskah	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2 Orang	Kab. Badung	
							2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	0 Eksemplar	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan koleksi budaya etnis nusantara	500 Eksemplar	2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	0 Eksemplar	Kab. Badung	
							2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	0 Eksemplar	Kab. Badung	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik	28 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	15 Unit kerja	2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	150 Berkas	Kab. Badung	
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	325 Berkas	Kab. Badung	
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	37 Laporan	Kab. Badung	
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	1400 Arsip	2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	Kab. Badung	
							2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1400 Arsip	Kab. Badung	
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	500 Berkas	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7000 Pengguna	Kab. Badung	
							2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	76 Laporan	Kab. Badung	
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	25 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah perangkat daerah/unit kearsipan yang melaksanakan penyusutan	3 Unit kearsipan	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	0 Berkas	Kab. Badung	
	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	30 orang	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah arsip tertutup yang dipinjamkan	100 Berkas	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	0 SOP	Kab. Badung	
							2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2 Arsip	Kab. Badung	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung	
							3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Kab. Badung	
				3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 bulan	3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	648 orang/bulan	Kab. Badung	
				3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	7 Jenis	3.25.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 dokumen	Kab. Badung	
							3.25.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Badung		
			3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terealisasi	6 unit	3.25.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung		
			3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	12 bulan	3.25.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung		
						3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
						3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Kab. Badung		
			3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 unit	3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit	Kab. Badung		
						3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Kab. Badung		
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	7986 tom	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	12 bulan	3.25.03.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	Kab. Badung	
						3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	16 Unit	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	100 persen	3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 orang	Kab. Badung		
						3.25.03.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	56 kelompok	Kab. Badung		
			3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang memberikan layanan	2 unit	3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 layanan 0 Layanan	Kab. Badung		
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	650 ton	3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	1 rekomendasi	3.25.04.2.01.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1 Rekomendasi	Kab. Badung	
						3.25.04.2.01.02 Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	Kab. Badung		
			3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya	63 Kelompok	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	33 kelompok			
						3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	29 kelompok			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 kelompok			
			3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya 12 bulan Pembudidayaan Ikan		3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			
						3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	2 Unit			
						3.25.04.2.04.04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen			
						3.25.04.2.04.05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Orang			
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari	1 Kawasan	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	1 Kawasan	3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kab. Badung	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	6742 ton	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pembinaan/pelatihan di bidang pengolahan skala mikro dan kecil	1 pelaku usaha	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Semua Kab/Kota	
			3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	6742 ton	3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19436.89 ton	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 pelaku usaha	Kab. Badung		
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan 100 % capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	Kab. Badung		
						3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 Laporan	Kab. Badung		
			3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	Kab. Badung		
			3.26.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			3.26.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen	Kab. Badung		
			3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	Semua Kab/Kota		
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Kab. Badung		
						3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	136 Unit	Kab. Badung		
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung		
						3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung		
						3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	Kab. Badung		
						3.26.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Badung		
						3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Kab. Badung		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	74.35 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
						3.26.02.2.01.04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39 Dokumen		Kab. Badung		
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Kawasan		Kab. Badung		
						3.26.02.2.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kab. Badung		
						3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan		Kab. Badung		
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	20 Unit		Kab. Badung		
			3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			3.26.02.2.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	12 Laporan		Kab. Badung		
						3.26.02.2.04.05 Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	100 Unit Usaha		Kab. Badung		
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	40 %	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen		Kab. Badung		
						3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Laporan		Kab. Badung		
						3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen		Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.03.2.01.05 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen		Semua Kab/Kota	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	20 %	3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekonomi kreatif yang berpartisipasi	50 usaha	3.26.04.2.02.09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	Kab. Badung	
						3.26.04.2.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		Kab. Badung	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	persentase pelatihan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif	100 %	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	600 orang	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	30 Orang	Kab. Badung	
						3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang		Kab. Badung	
						3.26.05.2.01.06 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang		Kab. Badung	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LKjIP	84,55 0	3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	7 Dokumen	3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung	
							3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	2240 Orang/bulan	3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1752 Orang/bulan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung		
						3.27.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Badung		
						3.27.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kab. Badung		
						3.27.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	Kab. Badung		
			3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	41 Paket	3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kab. Badung		
						3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Kab. Badung		
			3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	36 Laporan	3.27.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Badung		
						3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
						3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	586 Unit	3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	161 Unit	Kab. Badung	
							3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	411 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	Kab. Badung	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)	133648.2 Ton	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	127 Kelompok	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	Kab. Badung	
							3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	8 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	0.4 %	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	Kab. Badung	
							3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	Kab. Badung	
				3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	25 Sampel	3.27.02.2.03.02 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	7 Pengecer obat Hewan	3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	9 Kelompok	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	400 Ekor	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	162 Ekor	Kab. Badung	
							3.27.02.2.06.02 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	80 Ton	Kab. Badung	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	20739.85 Ha	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.2.01.02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen		
							3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	7 Unit	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1 Unit	Kab. Badung	
							3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi 4 Unit dan Dipelihara		Kab. Badung	
							3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	Kab. Badung	
				3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit Ternak yang dikelola dengan baik	1 Wilayah	3.27.03.2.03.01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan/ternak dan hasil ikutannya yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	100 %	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	13 Laporan	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	13 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	1 Laporan	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Kab. Badung	
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	62 Lokasi	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	Kab. Badung	
							3.27.04.2.04.03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	1 Laporan	Kab. Badung	
							3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	100 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	430 Ha	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	405 Ha	Kab. Badung	
							3.27.05.2.01.03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	25 Ha	Kab. Badung	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	100 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	8496 Kali	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	Kab. Badung	
							3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82 Unit	Kab. Badung	
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	59 Unit	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	100 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Dsitribusi Perdagangan	1 Unit	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	Kab. Badung		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	Kab. Badung		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar	100 %	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6 Laporan	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	Kab. Badung		
							3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stock atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	Kab. Badung		
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	98 Laporan	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	96 Laporan	Kab. Badung		
							3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	Kab. Badung		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung	100 %	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	5 Produk	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	Kab. Badung		
							3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 Produk	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen	100 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTTP yang di Tera dan Mendapat Pengawasan	100 %	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4000 Unit	Kab. Badung	
							3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	120 Orang	Kab. Badung	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Berkembangnya Pangsa Pasar Pelaku Usaha di Kabupaten Badung	10 UMKM	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	Kab. Badung	
							3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	Kab. Badung	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	4 Dokumen	Kab. Badung	
							3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung	
				3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	Kab. Badung	
				3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	444 Dokumen	Kab. Badung	
							3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
			3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung	
							3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung	
			3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kab. Badung	
							3.31.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	32 Unit	Kab. Badung	
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang Produknya Berkualitas dan Berdaya Saing	20 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	1 dokumen	3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		
					Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	1 Gugus					
					Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktifitas Usahanya	20 IKM					
							3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		
							3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Mempunyai Legalitas Usaha	100 %	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIINas	80 IKM	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang Terdata di SIINas	100 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	1 dokumen	3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH											
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	Kab. Badung	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		
							4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
							4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3 Laporan	Kab. Badung	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang/bulan	Kab. Badung	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
							4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kab. Badung		
						4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kab. Badung		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			
			4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Badung		
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket			
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			
						4.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	26 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	839 Laporan	Kab. Badung		
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	371 Unit	Kab. Badung		
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	109 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	484 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung		
						4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 Unit	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Rumah Jabatan	Kab. Badung	
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	Kab. Badung	
							4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 orang/bulan	Kab. Badung	
			4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah				4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi				4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.01.2.13.02 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
							4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	10 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	Kab. Badung	
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				4.01.01.2.14.01 Fasilitas Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitas keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
							4.01.01.2.14.02 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	1 laporan	Kab. Badung		
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan			
	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan		4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan	Kab. Badung		
						4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	Kab. Badung		
						4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung		
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	Kab. Badung		
						4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	Kab. Badung		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen			
						4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	Kab. Badung		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Disusun	0 Dokumen 5 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus 10 Kasus	Kab. Badung	
							4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	530 Dokumen	Kab. Badung	
				4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah			4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	40 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	Kab. Badung	
	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu	100 %	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	22 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	16 laporan	Kab. Badung	
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	18 Dokumen	Kab. Badung	
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	230 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	245 Laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	55 orang 0 Orang	Kab. Badung	
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (Sekretariat DPRD)	100 %	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kab. Badung	
							4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	4 laporan	Kab. Badung	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1274 Orang/Bulan	Kab. Badung	
							4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2050 Dokumen	Kab. Badung	
							4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 dokumen	Kab. Badung	
							4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Kab. Badung	
				4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3 paket	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 dokumen	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 laporan	Kab. Badung	
							4.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 dokumen	Kab. Badung	
				4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung	
							4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30 Unit	Kab. Badung	
							4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan	2 paket	Kab. Badung	
				4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 laporan	Kab. Badung	
							4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Kab. Badung	
				4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	Kab. Badung	
							4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 unit	Kab. Badung	
							4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	673 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	520 Orang/Bulan		
							4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	40 paket		
							4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	40 Orang		
				4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 laporan		
							4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	12 laporan		
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	83 persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 dokumen		
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 dokumen		
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	500 dokumen		
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	3 dokumen		
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen		
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen		
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen		
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen		
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen		
				4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	12 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	12 laporan		
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 laporan		
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 laporan		
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 laporan		
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen		
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen		
				4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen		
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	720 dokumen		
							4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	27 orang		
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	3 orang		
							4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat	120 dokumen		
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	14 Dokumen		
				4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	40 dokumen		
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	120 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 laporan		
				4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD			4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	103 dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0 Dokumen		
							4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2 dokumen		
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Badung	
							5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Badung	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Kab. Badung	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	Kab. Badung	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Badung	
								Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Paket		
							5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Badung	
								Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	7 Paket		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Tersedianya Bahan Logistik Kantor	0 Paket 16 Paket	Kab. Badung		
						5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 25 Paket	Kab. Badung		
						5.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Dokumen	Kab. Badung		
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung		
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Laporan	Kab. Badung		
						5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	Kab. Badung		
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit 35 Unit	Kab. Badung		
						5.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4 Unit	Kab. Badung		
						5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 31 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen 0 Dokumen		
						5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara			
						5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			
						5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	124 Usulan			
						5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Masukan Analisis Data dalam Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	0 Dokumen			
							Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Masukan			
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan			
						5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan			
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan Pengembangan Manusia	100 %	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen		
						5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan			
						5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	25 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen		
							5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah		
							5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	13 Perangkat Daerah		
				5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 Laporan 6 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	0 Laporan 6 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Laporan 5 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	0 Laporan 5 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	Kab. Badung	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 PD	Kab. Badung	
							5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	7 Laporan	Kab. Badung	
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Antara Renja SKPD Dengan RKPD	100 %	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	60 dokumen	Kab. Badung	
		Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai dengan SAP (BPKAD)	100 %					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
							5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 Laporan	Kab. Badung	
								Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan	12 laporan		
							5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/Bulan	Kab. Badung	
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	245 orang/bulan		
							5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Keuangan	1 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket			
						5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			
						5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	Kab. Badung		
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan			
						5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan			
						5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 dokumen	Kab. Badung		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan			
						5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	Kab. Badung		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	Kab. Badung		
						5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit 21 Unit	Kab. Badung		
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	12 Bulan	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan 0 Laporan 1 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan 12 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Materai dan Buku Cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 Bulan	Kab. Badung		
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan baik	12 Bulan	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit 1 Unit	Kab. Badung		
						5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	74 unit 20 Unit	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Unit		Kab. Badung	
						5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	208 unit		Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	165 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022	6 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022	6 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	9 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rencana Perda dan Perda tentang Perubahan APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	9 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peraturan Peraturan Terkait Keuangan Daerah	35 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung	
				5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	38 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	12 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	38 Dokumen	Kab. Badung	
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	4 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Laporan Keuangan Triwulanan dan Semesteran	3 Dokumen	Kab. Badung		
						5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang Transparan dan Akuntabel	1 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Buku Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perbup, Perda dan Perbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen	Kab. Badung		
						5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung		
						5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Perda Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung		
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing masing Kabupaten se-Provinsi Bali	2 Laporan	Kab. Badung		
						5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Dana untuk Kebutuhan Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	100 %	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Tersusun	1 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		
							5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		
							5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Kab. Badung	
							5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	70 Orang	Kab. Badung	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Jenis Pajak	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	12 dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen		
							5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	3 laporan		
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	212267 SPPT 0 Obyek Pajak		
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 dokumen		
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	103027 dokumen		
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	19329 dokumen 0 Dokumen		
							5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	23 laporan 0 Laporan		
							5.02.04.2.01.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan		
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Kab. Badung	
							5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Kab. Badung	
			5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang/bulan	Kab. Badung	
							5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	Kab. Badung	
			5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %		5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	444 Ekslemper	Kab. Badung	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Kab. Badung	
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Kab. Badung	
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	Kab. Badung		
						5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit	Kab. Badung		
						5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	42 unit	Kab. Badung		
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Kab. Badung		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 %	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	5.03.02.2.01.01 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	506 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2 lembaga	Kab. Badung	
							5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	Kab. Badung	
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 dokumen	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	316 dokumen	Kab. Badung	
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %		5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.03.03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 orang	Kab. Badung	
							5.03.02.2.03.07 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 laporan	Kab. Badung	
							5.03.02.2.03.12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	130 orang	Kab. Badung	
			5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelayanan kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %		5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	766 orang	Kab. Badung	
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	68 orang	Kab. Badung	
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 dokumen	Kab. Badung	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	215 orang	Kab. Badung	
				5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK/Sejenisnya di Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	47 orang	Kab. Badung	
							5.04.02.2.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 laporan	Kab. Badung	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
	5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen	5.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung	
							5.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi perangkat daerah	4 laporan	5.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan 0 Orang/bulan	Kab. Badung		
						5.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	Kab. Badung		
			5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	7 sub kegiatan	5.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 paket	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 Paket 1 paket	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	780 Dokumen	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	Kab. Badung		
						5.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung		
			5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah	2 jenis	5.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kab. Badung		
						5.05.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	23 Unit	Kab. Badung		
			5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan jasa penjunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Kab. Badung		
						5.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	Kab. Badung		
			5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	5 jenis	5.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 unit	Kab. Badung		
						5.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kab. Badung		
						5.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						5.05.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	7 unit	Kab. Badung		
						5.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	1 unit	Kab. Badung		
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	4 laporan 4 laporan	5.05.02.2.01.03 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan 0 Laporan	Kab. Badung	
						5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung		
						5.05.02.2.01.13 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi 1 rekomendasi	Kab. Badung		
						5.05.02.2.01.14 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	5 dokumen	5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Kab. Badung	
							5.05.02.2.02.02 Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 dokumen 0 Dokumen	Kab. Badung	
							5.05.02.2.02.03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen		
							5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen		
							5.05.02.2.02.10 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	Kab. Badung	
				5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	3 dokumen	5.05.02.2.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.05.02.2.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.05.02.2.03.07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Kab. Badung	
				5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	5 laporan	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	Kab. Badung	
							5.05.02.2.04.02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan 0 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	Kab. Badung	
							5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	Kab. Badung	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	100 %	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kab. Badung	
							6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kab. Badung	
				6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bl	Kab. Badung	
				6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Badung	
							6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	Kab. Badung	
							6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	38 Unit	Kab. Badung	
							6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Badung	
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Badung	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
							6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kab. Badung	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	106 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Badung	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)	100 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	Kab. Badung	
							6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan	Kab. Badung	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4 Laporan	Kab. Badung		
						6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Kab. Badung		
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %	6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	8 Laporan	Kab. Badung		
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan Yang Bersifat Consulting (Konsultasi)	100 %	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	100 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung	
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung		
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	Kab. Badung		
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 Perangkat Daerah	Kab. Badung		
	7.01 KECAMATAN										

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen dan Laporan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	Kab. Badung	
		Jumlah dokumen,laporan, orang/bulan, unit,paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	231 paket					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen		
		Jumlah Dokumen,orang/bulan,Paket, Unit dan Laporan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	400 Paket					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		
		Jumlah Laporan, Dokumen Orang/Bulan, dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	304 paket					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		
		Jumlah Laporan, Dokumen, Orang/Bulan, Paket dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1593 Paket					JUmlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen		
		Jumlah paket, dokumen , laporan, orang/bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 Paket					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen		
							7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung	
							7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung	
							7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung	
							7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan		
								jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan		
							7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 63 Orang/bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84 Orang/Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 94 orang/Bulan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 130 Orang/Bulan	Kab. Badung		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 paket Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 4 paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	Kab. Badung		
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 3 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 1 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket 1 Paket 1 paket 1 paket 1 Paket 1 paket	Kab. Badung	
							7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	576 Dokumen 180 Dokumen 12 Dokumen 396 Dokumen 3 dokumen 4 Dokumen	Kab. Badung	
							7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 1 Laporan 2 laporan 1 Laporan	Kab. Badung	
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat Menyurat	1 laporan 4 Laporan 12 laporan 12 Laporan 600 Laporan 4 Laporan	Kab. Badung	
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan 4 Laporan 12 laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Badung	
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit		
							7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	Kab. Badung	
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 unit		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	67 Unit		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	25 unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit 80 unit 19 unit 91 Unit 114 unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasii Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	3 unit 8 unit 8 Unit 5 unit 3 unit	Kab. Badung		
						7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kab. Badung		
	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah dokumen dan laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen dan Laporan pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ZJumlah Dokumen pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	6 paket 7188 Paket 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perncaanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait	2 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen 1 Dokumen			
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 laporan			
						7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di kecamatan jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Dokumen 1 laporan 2 laporan 12 laporan 10 Laporan	Kab. Badung		
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			7.01.02.2.04.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	35 Dokumen 186 Dokumen 260 Dokumen	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non Perizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6926 Laporan 2 Laporan 12 laporan 3000 Laporan 14782 Laporan	Kab. Badung		
						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	3 laporan			
	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,unit,pokmas/ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6, 3 Dokumen dan Laporan 27 Paket 26 Paket 215 Paket 61 paket	7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada kegiatan Koordinasi Pemerdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	25 Paket 24 paket 25 lembaga 67 Lembaga 36 Lembaga	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Badung	
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3591152 Dokumen		
							7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	2 Laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan		
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 Lembaga		Semua Kab/Kota Kab. Badung	
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 lembaga			
								jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam furom masyarakat 1 laporan			
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit		Kab. Badung	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 unit			
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 105 Unit			
								jumlah srana dan prasarana kelurahan nyang terbangun 1 unit			
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 1 pokmas/ormas		Kab. Badung	
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 pokmas/ormas			
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas			
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas			
				7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan		Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 laporan			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 6 Laporan			
								Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan		
		Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4 laporan					Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Intansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
		Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta	100 %								
				7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah laporan hasil koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian negara repubik indnesia	4 laporan	Kab. Badung	
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan		
								Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang - undangan dan/atau kepolisian Negara RI	12 Laporan		
	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Orang	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	100 orang	Kab. Badung	
		Jumlah orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63 orang					Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	65 orang		
		Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 orang					Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	240 orang		
		Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1110 Orang					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang		
		Jumlah Orang pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	240 orang					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang		
		Jumlah orang pada program penyelenggaran pada urusan pemerintahan umum	100 Orang					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	480 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan 630 Orang Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional			Kab. Badung	
	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah dokumen dan Laporan pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 dokumen	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen pada sub kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 Dokumen		Kab. Badung	
		Jumlah Dokumen pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa	36 Dokumen				jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	8 dokumen			
		Jumlah dokumen pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1 Dokumen				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen			
		Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45 Dokumen				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen			
		Jumlah Dokumen pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60 Dokumen				Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	12 Dokumen			
		Persentase fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bagian Tata Pemerintahan)	100 %								
						7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen		Kab. Badung	
							jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	6 dokumen			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.06.2.01.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen 12 Dokumen 6 Dokumen	Kab. Badung	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100 %	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kab. Badung	
							8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	Kab. Badung	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	Kab. Badung	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kab. Badung	
							8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 Dokumen	Kab. Badung	
							8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	Kab. Badung	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	Kab. Badung		
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Kab. Badung		
						8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Kab. Badung		
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	Kab. Badung		
						8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Badung		
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 orang	Kab. Badung	
						8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Laporan	Kab. Badung		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100 %	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	100 %	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang, Partai Politik, dan Lembaga yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 lembaga	Kab. Badung		
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Kab. Badung		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	Kab. Badung		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	185 Orang		
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1200 orang	Kab. Badung	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100 %	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 %	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	Kab. Badung	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Badung	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	237.843.048	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	48.856.486	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	181.410.284	
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.335.722	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.859.387	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.421.155	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	150.000.000	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	678.382.503	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.478.283	
2.22.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103.496.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	18.540.612.177	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.789.746	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.671.012	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.346.741.830	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.257.148	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.373.600	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	9.360.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.043.281	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.577.453	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.300.990	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	532.972.919	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.138.660.664	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	38.232.444	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.070.473.430	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.070.473.430	
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1.463.623.504	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.863.790	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.094.570	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	606.617.430	
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	24.577.947	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.244.869	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	531.550	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.441.355	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.835.133	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	207.534.216	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	31.382.421.564	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	7.463.069.200	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	7.463.069.200	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.888.582.618	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	460.716.107	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	242.520.536	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.562.198	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	543.272.800	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.1000	UPTD. Puskesmas Mengwi II	1.343.177.418	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.343.177.418	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.343.177.418	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.343.177.418	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	31.897.248	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12.270.015	
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	297.501.429	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	66.887.251.537	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	66.887.251.537	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	66.876.121.683	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.908.126.137	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.908.126.137	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.384.414.997	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	161.599.591	
1.03.11.2.02.04	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	65.143.845	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	45.694.462	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.902.236.271	
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.902.236.271	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	122.252.207	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	399.321.088	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	374.545.282	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.424.733.187	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.100.546.938	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.732.657	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.674.887	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.830.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.038.825.902	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.661.117.288	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	391.860.250	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	391.860.250	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	379.880.061	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.914.668	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.074.668	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.892.705.059	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.892.705.059	
2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	255.812.808	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.369.143	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.241.438	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.777.706.749	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	975.234.956	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.802.882	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	559.684.103	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.393.890	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5.393.890	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5.393.890	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.532.544	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.671.655	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.501.247.738	
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.738.110.088	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.253.604	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.499.500	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21.715.120.401	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21.359.387.545	
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	21.202.966.101	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.066.935	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	282.617.100	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	10.970.518.961	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	179.822.006	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	179.822.006	
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	116.636.762	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	211.589.142	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	66.548.487	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.285.034	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.252.834	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	351.017.555	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	351.017.555	
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	76.392.534	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	319.127.394	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.433.139	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.955.920	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	560.662.965	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	37.396.920	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	37.396.920	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	37.396.920	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	399.321.088	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12.645.843	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.504.455.365	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	105.451.729	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	105.451.729	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.051.863	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.256.863	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.960.728	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.400.541	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.677.497	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.973.257	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	636.107.700	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.054.406	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530.125.026	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	522.341.673	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6.578.535	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	585.711.516	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.851.784.022	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.851.784.022	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	734.526.100	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.784.298	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.214.714	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	22.484.760	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	22.484.760	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	22.484.760	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.150.014.308	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	164.731.656	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	170.318.046	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	170.318.046	
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	9.266.416	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.973.257	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.370.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.063.386.750	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	89.215.800	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	483.597.813	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	483.597.813	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	251.777.145	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.450.351	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.802.625.187	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.528.231.044	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.424.733.187	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92.152.627	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.631.740	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.639.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.914.480	
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.333.886	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.402.285	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.892.705.059	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.892.705.059	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.04.2.01.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	3.075.315.875	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.822.631.472	
1.03.02.2.01.55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	621.203.674	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.121.120.980	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.738.820	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.841.386.805	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.305.124.190	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	379.233.180	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.540.716	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	95.448.232	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.861.443	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.366.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.219.580.888	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.549.778	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.000.000.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.000.000.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.873.804.214	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.690.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.000.000.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.000.000.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.176.415	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	899.920.630	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.632.094	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.074.255.774	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.844.797.060	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	142.716.322	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.228.917	
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.530.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.888.582.618	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.140.215.299	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.140.215.299	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.523.447	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	561.694.839	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.431.561	
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80.640.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.238.565	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.340.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.396.354	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0300	UPTD. Puskesmas Abiansema II	893.124.517	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	893.124.517	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893.124.517	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	893.124.517	
1.02.0.00.0.00.01.0200	UPTD. Puskesmas Abiansema I	1.495.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.495.000.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.495.000.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.495.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.802.882	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.253.271	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	485.875.487	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	485.875.487	
2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	22.660.928	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.531.045	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	58.036.417	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	136.247.435	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	93.527.290	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18.968.044	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95.117.325.581	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.550.897.004	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	97.798.728	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.914.668	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.840.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	126.615.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.707.623	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.500.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.398.962	
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4.298.563	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.579.021	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	149.648.276	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	74.837.585	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.482.114.082	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	338.197.293	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	338.197.293	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	149.984.103	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	56.187.893	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.661.203	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	36.661.203	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.302.014	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.880.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	278.045.794	
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	139.003.693	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.424.733.187	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.193.283.978	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.550.851	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.132.386	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	128.094.208	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	9.398.962	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5.100.399	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	556.378.087	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	140.924.557	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.217.815	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.217.815	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.607.493.595	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.400.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.400.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	108.240.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.070.473.430	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.070.473.430	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	52.372.042	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.254.689.171	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.418.369.620	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.418.369.620	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.440.110.175	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.687.659	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.622.217.016	
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	592.037.938	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.370.454	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.445.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.674.887	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.620.097	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.195.100	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.759.488.106	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.759.488.106	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	884.823.058	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	121.413.688	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.778.378	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	61.499.735	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.132.386	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.387.623	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.000.000.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.000.000.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.760.599.479	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.760.599.479	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	653.963.031	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.000.000.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.000.000.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.812.938.120	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.389.097.149	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.044.416.676	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.000.000.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.000.000.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.865.405	
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.147.100	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	23.067.748	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.761.659	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.070.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.960.728	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.560.187	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.274.804.067	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.274.804.067	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	37.976.571	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.976.571	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.197.902	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	637.624.810	
1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	637.624.810	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	30.271.928	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	112.498.977	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.130.450.292	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.802.625.187	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.255.476	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.000.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.000.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	426.363.105	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	342.454.417	
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	58.924.703	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.000.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.000.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	29.033.928.991	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	29.033.928.991	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	27.437.893.691	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.000.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.000.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.970.412	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	81.427.005	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.373.600	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.970.600	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	17.290.573.366	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.290.573.366	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	15.552.607.609	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4.463.781.181	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.346.741.830	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.290.453.608	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.063.259	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	343.146.932	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	343.146.932	
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	343.146.932	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.721.967	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.001.055	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.046.125.916	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	20.413.705	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	20.413.705	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.523.085	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.615.138	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	483.597.813	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	483.597.813	
3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	23.510.053	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.861.443	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.070.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	17.290.573.366	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.290.573.366	
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	392.582.525	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.000.000.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.000.000.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.806.392	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.000.000.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.000.000.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.070.473.430	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.070.473.430	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	135.900.538	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.000.000.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	733.893.751	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.947.763.738	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	2.528.546.900	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	
1.04.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.993.519	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	116.993.519	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	116.993.519	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	25.293.275	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.865.405	
5.05.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	64.288.110	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.445.348	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	399.321.088	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12.129.963	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.562.539	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.873.804.214	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	444.771.856	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.353.836	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.662.863.468	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.865.405	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.521.095	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.367.585.181	
3.26.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	861.508.147	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.075.972	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.000.000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	144.088.858	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	110.199.195	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	110.199.195	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.784.774.998	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.504.455.365	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.243.450	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.243.450	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.631.514.998	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	70.480.890	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	426.363.105	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.722.088	
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	62.644.279	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.562.198	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.632.059	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	622.132.804	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.145.875.137	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.145.875.137	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21.715.120.401	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	355.732.856	
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	132.693.662	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	86.752.043	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.752.043	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	82.268.144	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.834.417	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.718.814	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	983.076.517	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	983.076.517	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.265.025	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.845.496	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	58.070.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.074.255.774	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	482.139.600	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	482.139.600	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.857.681	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.531.045	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	408.581.992	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	278.045.794	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.480.416	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	310.356.845	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	204.169.400	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	239.705.099	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	29.033.928.991	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	29.033.928.991	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	698.241.657	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.623.677	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	392.268.223	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.219.580.888	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.203.473.321	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.450.653	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.655.025	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.420.559	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	319.916.332	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.301.665.286	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	104.984.869	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	57.862.602	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.640.741	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.745.279	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.396.672	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	112.163.446	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.647.103.813	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	60.765.473.100	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	968.884.819	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	956.922.450	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.892.855	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.845.496	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.750.760	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.268.182	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.268.182	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.876.400	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.345.493	
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.224.608	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	10.058.464.536	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	329.491.664	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	154.233.188	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	87.234.402	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	48.675.071	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.362.868.486	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.055.799.495	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.707.623	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.220.600	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	509.856.425	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.958.675	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.958.675	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	539.284.155	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	426.363.105	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	342.454.417	
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	283.529.714	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.328.184	
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.689.587	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	968.884.819	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	956.922.450	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	934.179.740	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.471.485	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	606.617.430	
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	18.626.525	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.822.631.472	
1.03.02.2.01.54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	151.419.292	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.859.387	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.083.657	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.983.027	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.075.972	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.347.575	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42.297.770.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.443.199.910	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.443.199.910	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.636.169	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.759.488.106	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.759.488.106	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	662.847.986	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.077.385	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.905.360	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.934.726.387	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.916.955	
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	115.295.591	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	76.178.903	
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	76.178.903	
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	76.178.903	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	163.369.768	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.914.668	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.091.105.868	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.091.105.868	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.063.386.750	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7.979.803	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.089.715	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.336.851	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	104.299.733	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	280.286.099	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	120.482.744	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.960.008	
3.31.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.434.058	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.144.922.707	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.140.555.902	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.935.309	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95.117.325.581	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.679.134.518	
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	58.679.134.518	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.773.076.537	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1.601.501.555	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.376.856	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.376.856	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	18.816.847	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.687.785	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.809.300	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.478.283	
2.22.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	63.480.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	423.955.930	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	423.955.930	
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	301.459.235	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.059.190.628	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.052.478.349	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.048.962.897	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	531.095.392	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	531.095.392	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	52.311.508	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	578.702.775	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530.125.026	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.783.353	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.783.353	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.970.412	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.110.739	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	422.182.947.536	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	422.182.947.536	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	696.792.267	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.194.244	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.052.533	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.242.332	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	406.126.800	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.748.606	
1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.839.144	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.214.442	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.960.337.058	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	9.735.038	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.070.473.430	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.070.473.430	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.418.577.346	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.213.796.351	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	141.207.483.535	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.578.990.311	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	856.760.297	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.601.054	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.540.111	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.149.950	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56.948.608	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	12.949.264	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.937.648	
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.007.030	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.704.802	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.312.500	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.097.426	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.033.886.461	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.033.886.461	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.313.249.583	
2.15.02.2.01.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1.209.727.500	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	218.164.446	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.080.641	
2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	195.080.641	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.691.287.259	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	483.597.813	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	483.597.813	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	71.112.238	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.861.443	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.877.000	
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.984.551	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.195.036.867	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	63.974.182	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	2.805.188	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.805.188	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.805.188	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	13.915.186.439	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	57.171.355	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.432.267	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	55.432.267	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.114.104	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.601.200	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.901.360	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.467.655	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	778.376.096	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	478.132.782	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	132.024.612	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	132.024.612	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	132.024.612	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.333.457.391	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	11.204.682	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.623.677	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.303.950	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.397.399.480	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	970.313.544	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	509.230.241	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	19.507.996	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.691.530	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.094.330	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	213.038.468	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.354.544.615	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.354.544.615	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	3.651.393	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.138.660.664	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.893.556.037	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.169.908	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.530.662	
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4.353.258	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.353.258	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.543.814.492	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	846.592.137	
5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	526.235.213	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	31.382.421.564	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.422.589.069	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	17.650.136.695	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.243.532	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	32.963.428	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.392.094	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114.283.630	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.243.712	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.970.412	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	833.432.668	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.343.355.520	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.263.619.962	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.203.381.424	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.374.693	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.374.693	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.796.030	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	102.607.231	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	102.607.231	
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	102.607.231	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.789.746	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	237.206.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.309.876	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.323.970	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	321.963.316	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	321.963.316	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	321.963.316	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.037.607	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.464.867	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.477.551	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	469.905.162	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	211.638.266	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	211.638.266	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.754.279.771	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.758.579	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.691.530	
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.617.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.654.796	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2.351.365.987	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	2.351.365.987	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.999.345	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	211.999.345	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	170.773.894	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.869.806	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	123.547.855	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	123.547.855	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	52.179.030	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.851.784.022	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.851.784.022	
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	174.315.205	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.427.625	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.631.602	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.328.184	
2.22.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.670.097	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.954.165	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	19.537.991	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	19.537.991	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	469.905.162	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.112.625	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.112.625	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.051.863	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.150.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	37.976.571	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.976.571	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	23.580.767	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	487.788.454	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	487.788.454	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	11.961.871	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.852.700	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.262.052	
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	8.196.572	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	3.385.279	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	3.385.279	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.392.094	
2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.893.729	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.761.659	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.008.826	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.116.616	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	351.017.555	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	351.017.555	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	274.625.021	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	97.862.212	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.707.623	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.406.500	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.627.351.905	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.602.882.875	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	310.356.845	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	106.187.445	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.397.399.480	
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	427.085.936	
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	427.085.936	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.484.800	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	423.955.930	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	423.955.930	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	122.496.695	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.641.457	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	850.641.457	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	658.120.614	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	972.330.445	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.219.580.888	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.031.894	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.721.967	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.274.720	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.829.393	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	38.251.349	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.261.537.641	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	866.486.561	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.151.154	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.104.160	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.239.330	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.889.899	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.495.836	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.397.399.480	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	970.313.544	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	461.083.303	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.053.516	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.320.553	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.189.518.136	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.333.390.097	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	2.287.451.368	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.043.073	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.555.190	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.631.514.998	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	70.018.437	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.888.582.618	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	460.716.107	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	218.195.571	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	382.482.792	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	233.582.774	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.368.524	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100.987.650	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100.987.650	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100.987.650	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.760.599.479	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.760.599.479	
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.001.174.517	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.078.427	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.078.427	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.040.865	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.010.148	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	174.357.223	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	174.357.223	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	79.303.673	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	
1.04.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.846.150	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.132.484.062	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.132.484.062	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.132.484.062	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.066.935	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	302.568.680	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.037.607	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.590.910	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	28.925.681	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	268.518.108	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	268.518.108	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	268.518.108	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	502.517.249	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	499.982.543	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	38.652.112	
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	38.652.112	
2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	38.652.112	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	468.324.301	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	468.324.301	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.845.496	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.788.886	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	10.061.130	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8.841.386.805	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6.536.262.615	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95.117.325.581	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.887.294.059	
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	305.580.611	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	250.715.031	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	124.701.666	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.607.616	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.179.700	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.668.102	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	84.328.484	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.812.938.120	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.389.097.149	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.999.995.443	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.789.746	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.230.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.556.424	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.853.456	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.798.204	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.798.204	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.800.145	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.242.332	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	73.930.100	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.561.203.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	103.282.396	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	680.534.883	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	680.534.883	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.759.008	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.161.280	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.196.861.961	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.196.861.961	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	280.286.099	
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	113.769.801	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	205.244.627	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	124.442.009	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.039.363	
2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.828.693	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.578.993.403	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.024.146.667	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.024.146.667	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.201.593.783	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.205.834	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.742.025	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.614.723	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.858.025	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0400	UPTD. Puskesmas Abiansema III	1.008.714.081	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.008.714.081	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.008.714.081	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.008.714.081	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.431.561	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.258.370	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.504.455.365	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.377.760.186	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2.885.426	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.544.101.932	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.472.760.232	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.472.760.232	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.886.440	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	124.741.492	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.937.648	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	121.527.416	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.731.885.530	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0600	UPTD. Puskesmas Kuta I	1.265.852.688	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.265.852.688	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.265.852.688	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.265.852.688	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.444.001.553	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	103.197.850	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	103.197.850	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	240.850.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	76.470.080	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.638.262	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.638.262	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.051.863	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.740.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.333.457.391	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	157.762.929	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	329.491.664	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.516.322	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	95.516.322	
1.02.0.00.0.00.01.0700	UPTD. Puskesmas Kuta II	553.812.281	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	553.812.281	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	553.812.281	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	553.812.281	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	115.282.352	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115.282.352	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115.282.352	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.354.544.615	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.354.544.615	
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	4.828.993	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.373.600	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.060.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	702.559.695	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.369.143	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.528.329	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.531.045	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.052.534.661	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.954.165	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.416.174	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	15.219.424	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.063.386.750	
5.03.02.2.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	908.210.289	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.087.410	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.837.062	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.704.802	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.701.650	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.362.868.486	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.616.211	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.389.823	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	647.990.233	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.721.967	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.050.656	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.104.160	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	573.167.096	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.990.711	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.952.713	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.631.740	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.550.979	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	793.781.498	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	793.781.498	
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	533.035.686	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	265.114.323	
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	209.783.965	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	31.382.421.564	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.422.589.069	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	250.000.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.668.102	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	110.271.428	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	426.363.105	
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.722.088	
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	12.077.809	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.718.138	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	5.674.420	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5.674.420	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.782.800	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.782.800	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.310.253	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.997.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.000.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.000.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	22.934.814	
1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	5.279.561	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.000.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.000.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.261.537.641	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	395.051.080	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.759.205	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.759.205	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.806.800	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.595.351.723	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.595.351.723	
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	103.115.627	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.431.406.113	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.301.665.286	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.772.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.101.300	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.946.359	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	559.340.306	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	39.532.799	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	170.773.894	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.904.088	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.409.618	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.471.400	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	793.781.498	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	793.781.498	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	147.264.655	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.213.796.351	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.312.816	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.362.427	
3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43.956.044	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.045.000	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	66.045.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0900	UPTD. Puskesmas Mengwi I	2.390.663.773	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.390.663.773	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.390.663.773	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.390.663.773	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.583.179	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	280.286.099	
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	46.033.554	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	361.929.460	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.519.044.339	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.302.014	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.250.271	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.719.509	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.311.087	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.711.087	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	8.235.948	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	8.235.948	
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	8.235.948	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.804.043.145	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.328.184	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.968.500	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.631.740	
3.31.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.240.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.962.232	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.962.232	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.188.902	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.901.360	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.443.834	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	26.248.180.680	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	971.946.913	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.757.118	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	12.111.683.833	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.369.143	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	22.934.814	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	4.214.856	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.231.477.670	
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	537.960.811	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	43.711.252	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	7.010.233	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	7.010.233	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.112.972	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25.112.972	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.112.972	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.966.090	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.441.625	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.059.190.628	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.052.478.349	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.515.452	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.765.531	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.099.247	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.937.648	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.404.891	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.354.544.615	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.354.544.615	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.336.633.064	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.759.008	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.613.757	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	20.042.267	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	138.122.565	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	138.122.565	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	138.122.565	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	59.895.360.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.962.232	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.962.232	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.773.330	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	43.134.432	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.134.432	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	43.134.432	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.852.700	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	8.256.625	
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	6.377.241	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.025.499	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.859.387	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.037.607	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	454.101.830	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.309.876	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.889.481	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	489.077.995	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	250.715.031	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	126.013.365	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	71.529.431	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.230.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	27.614.535.091	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.422.501.074	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	531.095.392	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	531.095.392	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	478.783.884	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.640.741	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.162.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.916.523	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.083.265	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.574.883	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	490.912.171	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.121.120.980	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.087.382.160	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.526.814	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.245.085	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.273.430.746	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.068.393.863	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.068.393.863	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	132.441.197	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	132.441.197	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	9.034.219	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.093.259.226	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	485.875.487	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	485.875.487	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	463.214.559	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.310.253	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	138.312.653	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.329.838	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.000.000	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.834.417	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.115.603	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.004.590	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.018.833.528	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.523.690	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.526.814	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	584.652.366	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.829.393	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	6.388.474	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.595.351.723	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.595.351.723	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	26.004.625.779	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21.715.120.401	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	21.359.387.545	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	156.421.444	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.092.178.093	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	37.994.119.184	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	719.358.668	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.159.874.850	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.811.453.443	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.396.672	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.111.291.366	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.365.749.814	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.365.749.814	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	411.054.580	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.074.255.774	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.844.797.060	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.362.748.957	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.457.927	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.077.231	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	150.709.665	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	150.709.665	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150.709.665	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.822.631.472	
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	812.826.992	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.585.413	
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.585.413	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.058.459	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.499.279	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.620.438	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.321.699.725	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	123.780.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.309.876	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.162.311	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.589.400.750	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.500.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.979.235	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.929.235	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	132.441.197	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	132.441.197	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	11.561.367	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.802.083.312	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.802.083.312	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	454.372.660	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	7.945.620	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.721.967	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.395.536	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.441.355	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.400.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.990.711	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.532.835	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.441.599.530	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.672.733	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.431.561	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.984.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	106.954.200	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	59.140.858	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.408.457	
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2.350.692	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	556.378.087	
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	5.100.399	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.937.648	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	16.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.389.823	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.996.437	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.159.514.710	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.083.064.986	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	472.565.089	
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	130.646.956	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	246.444.352	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	72.814.641	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.467.100	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	22.934.814	
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	13.440.397	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8.295.329	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.641.457	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	850.641.457	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	7.227.358	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.973.257	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.395.557	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	45.522.253	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.429.884	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.268.950	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.200.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	7.502.313.610	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	367.046.636.492	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	349.625.967.942	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.589.400.750	
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.414.901.250	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	329.491.664	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	31.132.154	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	31.132.154	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	246.684.912	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	246.684.912	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	246.684.912	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	280.744.690	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	71.691.535	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.829.393	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	109.325.285	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	402.365.593	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	345.959.962	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505.459.838	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.098.838	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	6.124.497	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.124.497	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.124.497	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.829.393	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	70.846.835	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.631.740	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.518.925	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.071.572.457	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.071.572.457	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.913.106	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.957.590	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.504.455.365	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.377.760.186	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26.950.608	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.228.917	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.387.040	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.253.604	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.521.664	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.244.869	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.990.400	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	980.859.387	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	689.354.575	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.243.532	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.523.447	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.061.747	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	33.000.000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.873.804.214	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.849.500	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	329.491.664	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	48.610.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	48.610.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.273.291.994	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.252.108.359	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	37.976.571	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	37.976.571	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	7.197.902	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	556.161.964	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	556.161.964	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18.351.662	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.378.233	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.489.920	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.219.580.888	
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.525.895	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	68.672.815	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	68.672.815	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	68.672.815	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.654.396.672	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	430.941.860	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.482.114.082	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.143.916.789	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.143.916.789	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.594.913.572	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.594.913.572	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.814.539	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	123.547.855	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	123.547.855	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	71.368.825	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.159.514.710	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	984.716.011	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.443.814	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.388.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	292.168.823	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	292.168.823	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	292.168.823	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	722.478.549	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.647.103.813	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.498.344	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.244.869	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.671.919	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.501.247.738	
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	65.145.911	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.243.535	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.852.925.703	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.996.230	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.954.165	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.416.174	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	35.196.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.244.712	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.598.410	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.490.397	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	253.882.937	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.687.785	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.753.032	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.578.993.403	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82.500.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82.500.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.309.876	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	189.924.114	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.269.715.009	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	454.372.660	
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	446.427.040	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.852.700	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	192.334.023	
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	192.334.023	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.195.036.867	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	244.157.725	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.781.705.440	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.781.705.440	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.821.388	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.120.188	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.333.457.391	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.911.046.662	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	492.594.562	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	371.599.059	
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	187.112.604	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.579.021	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	812.971.849	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	114.171.434	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.039.363	
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.631.869	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.556.424	
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.702.968	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.000.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.000.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.378.233	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	226.341.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.000.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.000.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	9.960.337.058	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	9.950.602.020	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.821.388	
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	187.290.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	297.718.030	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	149.984.103	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	48.094.165	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.691.530	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.851.170	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.947.763.738	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	10.438.854.289	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	276.506.764	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.956.059	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	174.802.317	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	72.204.909	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.530.662	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.177.404	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.643.623	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	86.752.043	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	86.752.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	4.483.899	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	547.737.163	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	547.737.163	
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	547.737.163	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	869.701.464	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.242.332	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.047.532	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	43.533.963	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	43.533.963	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	43.533.963	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.802.625.187	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.221.992	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	343.972.103	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.231.477.670	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	464.143.196	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.459.445	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.130.912	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	66.887.251.537	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	66.887.251.537	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.129.854	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	606.617.430	
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	188.229.153	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95.117.325.581	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.550.897.004	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	10.453.098.276	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.821.388	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.558.777	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	472.565.089	
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	199.244.655	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.270.368.406	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	106.484.286.081	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106.484.286.081	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	983.076.517	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	983.076.517	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.340.173	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	55.716.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	265.778.155	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.778.155	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	265.778.155	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	45.363.387	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	45.363.387	
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	45.363.387	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.189.518.136	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.856.128.039	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.333.699.937	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.627.351.905	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.387.046	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.419.700.357	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	132.441.197	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	132.441.197	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.803.413	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.631.514.998	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.387.831.374	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	51.194.028	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.725.227	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	718.087.587	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.478.283	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.777.560	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	31.382.421.564	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.422.589.069	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.522.452.374	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.777.706.749	
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.204.587	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.761.659	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	803.649.028	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.238.565	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.462.377	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.858.427	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.353.326	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	250.715.031	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	126.013.365	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	54.483.934	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.707.623	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	606.580.523	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.532.544	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.634.794	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	502.837.692	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.613.433	
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	738.163.255	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.778.378	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.278.643	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	32.416.962	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	32.416.962	
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	14.943.975	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	295.195.076	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	10.786.299	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	844.683.349	
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.282.434	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.723.864	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.878.614.767	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.878.614.767	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.713.775	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.739.700	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95.117.325.581	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.887.294.059	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	25.581.713.448	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	113.977.796	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	113.977.796	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.234.928	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	556.378.087	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	37.669.393	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.077.385	
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.919.252	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	265.114.323	
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	7.956.531	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.543.097	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.629.700	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12.769.912	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.769.912	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.409.618	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	656.625.048	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.435.281	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	649.173.497	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	767.608.586	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.408.457	
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	11.003.493	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	142.910.087.965	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	142.910.087.965	
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	978.562.128	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.587.528	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.253.630.728	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.485.837.469	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.430.899	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	8.430.899	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.231.477.670	
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.118.979	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.979.235	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.500.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.203.729	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.311.087	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.100.000	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	52.860.086	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	169.572.548	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.412.352	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.412.352	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.543.097	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.864.021	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	294.748.606	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	285.909.462	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.1300	UPTD. Puskesmas Petang II	839.560.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	839.560.000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	839.560.000	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	839.560.000	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.686.568.114	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.686.568.114	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	695.722.017	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	422.651.524	
3.26.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	422.651.524	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	266.049.399	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	258.657.919	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	170.318.046	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	170.318.046	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	161.051.630	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	329.491.664	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	154.233.188	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	66.998.786	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.063.386.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12.650.374	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	7.089.059	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.402.285	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.402.285	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.644.360	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.644.360	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100.644.360	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	184.977.066	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.916.523	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.833.258	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	53.520.985	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	252.945.501	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	27.614.535.091	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5.192.034.017	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.231.477.670	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	180.254.684	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	784.048.632	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	172.182.093	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.540.111	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	11.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.934.726.387	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.984.798	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	68.984.798	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	469.905.162	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	249.154.271	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	249.154.271	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.536.726	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	820.298.435	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	110.724.060	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.108.071	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.285.346	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.131.117	
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.131.117	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	39.293.245	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	39.293.245	
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	5.753.784	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.392.094	
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	977.344.635	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.137.329.520	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	980.153.520	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.543.097	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.538.942	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.443.199.910	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.443.199.910	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	21.394.466.690	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	75.878.605	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	35.870.597	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.870.597	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.784.298	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.109.585	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	430.604.177	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	430.604.177	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.220.650	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	205.244.627	
3.26.02.2.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	80.802.618	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.812.938.120	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	173.423.840.971	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	173.423.840.971	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.572.801.075	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	658.137.004	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	389.370.454	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.925.454	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.613.433	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.097.615.116	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.647.103.813	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.661.188	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.747.668	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.026.854	
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	367.046.636.492	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17.199.413.077	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.798.204	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.798.204	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.998.059	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.631.740	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.682.836	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	679.352.267	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.003.725.427	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	7.986.209.104	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.986.209.104	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.021.989.581	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.021.989.581	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.1400	UPTD. Puskesmas Kuta Utara	1.550.445.536	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.550.445.536	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.550.445.536	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.550.445.536	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	618.901.036	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	34.738.992	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	39.293.245	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	39.293.245	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	33.539.461	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.760.599.479	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.760.599.479	
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	105.461.931	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	11.400.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.852.700	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	16.262.052	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	8.065.480	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.409.958.855	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.399.295.800	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.441.599.530	
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110.910.553	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	502.517.249	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2.534.706	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	125.437.249	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	101.918.495.890	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.066.988.850	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	265.114.323	
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	47.373.827	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.050.680	
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.925.340	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.000.000.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.000.000.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	591.572.582	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.000.000.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.000.000.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.723.564	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.100.000	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.187.314.980	
3.31.2.07.000.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
3.31.2.07.000.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.187.314.980	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	250.715.031	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	124.701.666	
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	46.094.050	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	127.981.152	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.579.021	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	149.648.276	
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	74.810.691	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.372.401	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	21.830.759	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.030.323	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.196.352	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	492.594.562	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.995.503	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	7.373.281	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.845.496	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.867.050	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.914.480	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.580.594	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.593.656.497	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.593.656.497	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	367.046.636.492	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	210.947.561	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.253.604	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.372.440	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	111.273.270	
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	111.273.270	
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	103.011.989	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.640.741	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.213.218	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	13.719.040.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.244.712	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.646.302	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.578.993.403	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	472.346.736	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	472.346.736	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	340.574.583	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	141.658.639	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.030.323	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.833.971	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.622.217.016	
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	16.338.689	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	846.592.137	
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	83.890.292	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.266.552	
2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.266.552	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	492.594.562	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	371.599.059	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	184.486.455	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	31.382.421.564	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.558.988.295	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.558.988.295	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.058.650.000	
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.058.650.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	382.482.792	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	5.536.152	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.608.774.325	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4.083.311.444	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.083.311.444	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.852.189	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.965.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.913.106	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	103.290.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.691.530	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.979.863	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3.195.036.867	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	2.886.904.960	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	651.836.972	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	237.843.048	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	76.256.503	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.159.874.850	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	325.555.407	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.973.257	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.100.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.899.258	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.783.357	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	483.597.813	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	483.597.813	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	137.198.377	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0800	UPTD. Puskesmas Kuta Selatan	1.920.687.562	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.920.687.562	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.920.687.562	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.920.687.562	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.777.706.749	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	100.054.254	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.641.457	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	850.641.457	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	179.977.335	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.668.102	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	84.762.239	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	644.879.788	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.049.873	
5.05.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	239.266.394	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.873.804.214	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.269.492.858	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	426.363.105	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	9.186.600	
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	9.186.600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	114.838.864	
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	5.546.630	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.402.418	
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.099.169	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.579.021	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	71.958.896	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	71.958.896	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2.799.034.413	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	24.848.156	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.355.818	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.355.818	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	69.744.276.059	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	69.744.276.059	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	80.677.386	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.624.957.788	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.111.839	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	29.033.928.991	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	29.033.928.991	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	886.953.314	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.578.990.311	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	856.760.297	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	850.159.243	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.409.618	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.313.170	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	492.594.562	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.995.503	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	113.622.222	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.369.143	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	281.599.376	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.114.104	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.297.704	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	179.822.006	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	179.822.006	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.185.244	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.562.198	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.657.339	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.608.774.325	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.513.819	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20.513.819	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	137.023.328	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	65.477.595	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	618.901.036	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	150.583.199	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	8.797.853	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.851.784.022	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.851.784.022	
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	306.667.723	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.000.000.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.000.000.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.244.869	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.501.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.000.000.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.000.000.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	995.176.415	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.255.785	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.000.000.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.000.000.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.595.351.723	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.595.351.723	
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.747.280.485	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.822.005	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.544.101.932	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.341.700	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	71.341.700	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.378.426.625	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.146.390.718	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.698.467	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	231.276.425	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	231.276.425	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	231.276.425	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.003.725.427	
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.008.909.877	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.008.909.877	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1.243.532	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.043.073	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.487.883	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	8.097.800	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	2.138.660.664	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	206.872.183	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.200.000	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	78.387.141	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	689.132.386	
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.650.555	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.420.559	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.536.776	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.631.514.998	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.415.988	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.050.680	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.125.340	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.765.531	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.666.284	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	472.565.089	
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	142.673.478	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.077.385	
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.252.773	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.148.002.110	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	77.539.547	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	77.539.547	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	77.539.547	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.946.359	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.310.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.253.630.728	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	71.968.287	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	192.901.131	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	192.901.131	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	7.333.457.391	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.253.443.118	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.321.699.725	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.996.720	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	487.788.454	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	487.788.454	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	475.826.583	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.049.845	
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.049.845	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.888.582.618	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	287.651.212	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	287.651.212	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	69.229.670	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.181.878.911	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.181.878.911	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.300.990	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.900.771	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.786.000	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.786.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	114.838.864	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	109.292.234	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.189.518.136	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.189.518.136	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	2.333.390.097	
5.04.02.2.01.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	45.938.729	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.616.467	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	144.088.858	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.889.663	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	33.889.663	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	278.045.794	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17.018.063	
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.137.329.520	
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.176.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	170.060.202	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	820.298.435	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	634.696.609	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.624.957.788	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.901.860	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	643.845.496	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	536.368.800	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	112.492.618.398	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	64.990.959.398	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.373.600	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.983.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	381.072.974	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.045.255	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	649.656.843	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	656.829.393	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	432.017.450	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.523.085	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.907.947	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.889.899	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.394.063	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.624.957.788	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.582.038.997	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	29.033.928.991	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	29.033.928.991	
1.04.05.2.01.04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	10.840.329	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.443.814	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.825.045.149	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.189.518.136	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.856.128.039	
5.04.02.2.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	520.657.234	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	379.233.180	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.540.716	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.794.244	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.420.559	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83.478.572	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	778.376.096	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	90.873.782	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.032.813	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.096.569	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.408.514	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	77.265.000	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.092.178.093	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	788.172.150	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.909.459	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	17.290.573.366	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.290.573.366	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.345.383.232	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.499.279	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.790.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	
3.26.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.110.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.786.892.824	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.786.892.824	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	251.670.840	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.411.602	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.596.580	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.759.296.683	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.407.024	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.822.631.472	
1.03.02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	2.237.181.514	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632.540.111	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	571.390.161	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	983.076.517	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	983.076.517	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	964.471.319	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.687.785	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.125.453	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	2.643.156.492	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.362.868.486	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	291.452.780	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.579.021	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	812.971.849	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	698.800.415	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.913.106	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	550.345.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	132.441.197	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	132.441.197	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	49.662.054	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140.098.329	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	131.423.555	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	4.304.995.731	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	20.486.488.063	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	33.474.260.659	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	31.382.421.564	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.937.775.000	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.937.775.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.429.884	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	612.863.934	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	246.444.352	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	101.190.128	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	11.187.148.462	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.187.148.462	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	11.187.148.462	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.901.360	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.714.871	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.759.008	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	83.383.200	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	968.884.819	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.962.369	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.962.369	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	618.901.036	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	309.824.866	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	111.273.270	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	111.273.270	
3.26.04.2.02.10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	8.261.281	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.990.711	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.505.163	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	379.233.180	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68.692.464	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	68.692.464	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.562.042.856	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.562.042.856	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	601.192.061	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	490.429.101	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.032.115	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.435.639	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	166.910.967	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.075.972	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.728.397	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	121.382.148	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	106.331.041	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	70.456.807	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	181.410.284	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	178.657.302	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13.947.763.738	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	980.362.549	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	278.045.794	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	106.543.622	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.270.368.406	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.786.082.325	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.597.798.100	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.263.619.962	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.400.978	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.811.414.576	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104.000.617.362	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	104.000.617.362	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.784.298	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.459.999	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	86.706.216	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.319.342	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.332.519	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.614.723	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.858.852	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.378.233	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.487.313	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.835.380	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.365.749.814	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.365.749.814	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	463.641.200	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	75.878.605	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.008.008	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	12.430.942	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	178.834.834	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	248.457.927	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.380.696	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	968.884.819	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	956.922.450	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.849.855	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.311.087	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.500.000	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	1.876.783.462	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	105.883.527	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	105.883.527	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	875.104.160	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	41.697.734	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	368.309.876	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	68.010.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.789.746	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.682.734	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.420.559	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.878.879	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	754.802.882	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.865.508	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.424.733.187	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.038.749.644	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.821.388	
1.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	169.697.843	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.678.368.107	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.678.368.107	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.757.118	
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	725.267.160	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	181.410.284	
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1.417.260	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	14.115.255.662	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	279.506.219	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.967.489	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.026.870	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	793.781.498	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	793.781.498	
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	113.481.157	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.367.585.181	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	506.077.034	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	137.023.328	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	71.545.733	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	820.298.435	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	74.877.766	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.695.369	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.589.787	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.852.925.703	
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.678.929.473	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.478.283	
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.724.223	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.668.102	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	64.265.403	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600.574.883	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	109.662.712	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	509.856.425	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	504.897.750	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.949.334	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	358.165.035	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	358.165.035	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	358.165.035	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	358.165.035	
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	358.165.035	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.244.869	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.550.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	453.352.480	
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	39.070.941	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.695.369	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.105.582	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.004.590	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.586.385	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.1200	UPTD. Puskesmas Petang I	798.960.083	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	798.960.083	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	798.960.083	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	798.960.083	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.622.217.016	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	124.449.837	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	657.697.104	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	657.697.104	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	557.242.332	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.068.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.960.008	
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.286.955	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	572.241.677	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	572.241.677	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	572.241.677	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.841.986.029	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.644.916.161	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.531.045	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3.465.624.460	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.189.518.136	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.189.518.136	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.856.128.039	
5.04.02.2.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	1.770.868	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.292.137.632	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11.003.725.427	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	8.606.446	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	8.606.446	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.108.071	
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.822.725	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.409.958.855	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.663.055	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.865.405	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.970.600	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.321.699.725	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.073.255	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.376.856	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.376.856	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.560.009	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.934.726.387	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.916.955	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	51.664.082	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0500	UPTD Puskesmas Abiansema IV	1.027.457.201	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.027.457.201	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.027.457.201	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.027.457.201	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.229.141.458	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.229.141.458	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.253.604	
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.860.000	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.561.908	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.561.908	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.059.190.628	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	6.712.279	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.712.279	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.956.059	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	174.802.317	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	102.597.408	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.120.609.248	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	601.192.061	
3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	110.762.960	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.253.630.728	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.695.824.972	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	221.118.519	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	221.118.519	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	45.936.382	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.194.244	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.141.711	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.624.957.788	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.905.092	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.526.814	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.629.363	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.228.917	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.311.877	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.301.665.286	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.807.908.417	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.039.363	
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.333.794	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	142.910.087.965	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	142.910.087.965	
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	3.112.212	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.580.058.734	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	211.589.142	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	145.040.655	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.586.325.947	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.586.325.947	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	846.592.137	
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	236.466.632	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	479.825.332	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	479.825.332	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	479.825.332	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.053.516	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.732.963	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	556.378.087	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	215.915.423	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.697.394	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	113.977.796	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	113.977.796	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.742.868	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.674.887	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.646.390	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.074.255.774	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	747.319.114	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	747.319.114	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.362.427	
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.406.383	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.302.014	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	895.207.733	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	992.409	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	992.409	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.059.239.480	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.589.400.750	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.999.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.901.360	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.275.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.538.320.110	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.538.320.110	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	565.777.049	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	556.378.087	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	156.768.315	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	56.948.608	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	43.999.344	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	426.037.335.767	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	617.821.388	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	242.154.580	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.159.874.850	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	22.866.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.131.004.590	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.584.677	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.263.619.962	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.029.837.560	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.021.167	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.021.167	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.374.693	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.374.693	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	13.578.663	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.475.534	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.807.277	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	32.111.900.753	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505.459.838	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	136.898.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	565.037.607	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	65.880.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.354.109.386	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.354.109.386	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.759.296.683	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.748.879.046	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	516.049.873	
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	276.783.479	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.354.544.615	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.354.544.615	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.431.165	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.623.677	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.051.504	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.450.653	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	393.857.019	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.169.908	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.169.908	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	556.161.964	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	556.161.964	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	537.810.302	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	263.503.104	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.043.161	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.936.851	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.441.599.530	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.098.152	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	136.897.197	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.577.453	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.373.600	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.000.000	
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	47.814.158	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	47.814.158	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	174.357.223	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	174.357.223	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	91.037.806	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	391.860.250	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	391.860.250	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	11.980.189	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.273.430.746	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	205.036.883	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	205.036.883	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.063.602.795	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.441.355	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.206.222	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	623.884.692	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	242.175.458	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.127.936.900	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	985.388.241	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	280.744.690	
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	209.053.155	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.622.217.016	
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	671.363.544	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.435.281	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.883.550	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	6.313.188	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.431.561	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.548.691	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.144.922.707	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.472.747.554	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.211.068.200	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.211.068.200	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	286.074.737	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	57.171.355	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1.739.088	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	1.739.088	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	778.376.096	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	209.369.532	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	121.382.148	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.051.107	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.051.107	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4.686.572	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	2.343.286	
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.343.286	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	108.643.579	
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.393.047	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.393.047	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.631.514.998	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.768.309	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.759.488.106	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.759.488.106	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	211.817.062	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	218.164.446	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.083.805	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	23.083.805	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemai	13.117.692.477	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.773.651	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.183.283	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.051.863	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.905.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.595.351.723	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.595.351.723	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	462.977.622	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.038.825.902	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	8.377.708.614	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.000.000.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.000.000.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.239.956.339	
2.11.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.156.593	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.000.000.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.000.000.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	108.205.798.333	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.545.429.884	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	886.297.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.543.097	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.980.434	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	382.482.792	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	143.363.866	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.691.530	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.149.167	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.420.259.582	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.420.259.582	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.402.418	
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.303.249	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.377.444	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	276.956.059	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102.153.742	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	102.153.742	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.863.952	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	850.641.457	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	850.641.457	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.316.150	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.523.447	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	842.083.903	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.934.726.387	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	244.916.955	
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	77.957.282	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.634.964.667	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	212.600.477	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.273.291.994	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.737.670	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	618.901.036	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.753.979	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.376.255	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.376.255	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.530.662	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.177.404	
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5.175.376	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4.313.249.583	
2.15.02.2.01.03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.103.522.083	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.662.238.822	
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.185.392.094	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.870.100	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	5.143.391.139	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.143.391.139	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	98.589.440	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	142.910.087.965	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	142.910.087.965	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	141.928.413.625	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.504.455.365	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.377.760.186	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.347.924.152	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.144.922.707	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.531.619.251	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.704.802	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.497.500	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.838.798	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	60.838.798	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60.838.798	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	17.408.457	
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4.054.272	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.087.410	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.814.451	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.563.037.333	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.648.523.447	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.682.958	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	402.365.593	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	56.405.631	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.066.935	
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	12.210.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.074.255.774	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.844.797.060	
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	339.331.781	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.298.469.240	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	108.643.579	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	105.250.532	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	105.250.532	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.465.040.102	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	202.087.410	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.435.897	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.543.097	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.530.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.456.283.703	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.273.291.994	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.445.965	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	49.080.363	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	39.092.178.093	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	309.886.759	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.802.689	
5.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.157.485	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.356.960.224	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.356.960.224	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	43.711.252	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	36.701.019	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	36.701.019	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.391.839.014	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	237.843.048	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	112.730.059	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.450.653	
2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.534.300	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	397.812.144	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.450.653	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.484.961.109	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.499.279	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	378.505.300	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.530.662	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.177.404	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.513.312	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.503.635.154	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.043.161	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.25.04.2.01.02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3.106.310	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.066.255.377	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.243.623.905	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	211.561.478	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.251.128.452	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.247.838.452	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.090.723.564	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.086.623.564	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.570.773.396	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.880.283.317	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.032.813	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.365.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.640.741	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.420.244	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	297.369.768	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	389.991.453	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	174.357.223	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	174.357.223	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	174.357.223	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4.015.744	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.238.565	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.237.188	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.441.599.530	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	58.674.903	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.285.034	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.052.200	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.159.514.710	
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	91.733.713	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	851.980.516	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40.709.091	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.761.659	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.032.905	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.251.128.452	
5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.290.000	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.499.279	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.583.541	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.1100	UPTD. Puskesmas Mengwi III	1.097.972.222	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.097.972.222	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.097.972.222	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.097.972.222	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	803.190.250	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	803.190.250	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.713.775	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.974.075	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.443.814	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.860.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	24.848.156	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	6.492.338	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	6.492.338	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92.840.400	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.919.506.621	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.115.882.367	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.863.790	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.769.220	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.966.090	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.524.465	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	49.161.900	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	5.892.705.059	
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.892.705.059	
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	2.561.576.376	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.606.960	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	329.880.752	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.319.342	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.986.823	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	3.703.762.569	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	32.416.962	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	32.416.962	
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.472.987	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.530.662	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.530.662	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.177.404	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.845.093	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	266.049.399	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.391.480	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.040.865	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.030.717	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.170.531.045	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.753.515	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.777.706.749	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.700.212.952	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.812.938.120	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.389.097.149	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.141.962.910	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.634.964.667	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.422.364.190	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.578.990.311	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.722.230.014	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2.722.230.014	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.263.156	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.263.156	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	87.496.197	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	344.716.995	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	344.716.995	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	344.716.995	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	309.080.703	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	309.080.703	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	309.080.703	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.934.726.387	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	2.620.824.634	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.620.824.634	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.422.830.840	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.032.115	
2.23.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.596.476	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.475.534	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.668.257	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	221.118.519	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	221.118.519	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	175.182.137	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.576.910.778	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	21.715.120.401	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	355.732.856	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	223.039.194	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	96.328.401	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	21.443.199.910	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.443.199.910	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.097.051	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	583.812.915	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	122.774.112	
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4.686.572	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2.343.286	
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	2.343.286	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	125.270.368.406	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.786.082.325	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.188.284.225	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perikanan	13.084.980.891	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.929.797.239	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.759.008	
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	91.600.771	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.125.681.550	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.435.281	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.344.055	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	927.693.500	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	243.765.967	
1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	142.463.435	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.622.217.016	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	218.027.008	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	299.905.378	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	112.074.273	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.420.281.958	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127.141.556	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.321.699.725	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.147.849.750	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.045.811.456	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	737.913.106	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.320.516	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.487.751.939	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.793.063	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.858.427	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.505.101	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	132.441.197	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	132.441.197	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	22.380.144	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	101.486.204.186	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.000.000.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.000.000.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.198.796.981	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.006.105	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.000.000.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.000.000.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.547.991.672	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	606.617.430	
5.05.02.2.01.14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	375.183.805	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.000.000.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.300.020.943	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	608.801.028	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	187.118.193	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.527.185	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.668.102	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	110.040.548	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.708.753	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	2.646.595.516	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	513.039.363	
2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.245.007	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	122.878.408	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	122.878.408	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	122.878.408	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.854.552	
3.26.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.625.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.036.562.592	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	130.393.453	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	130.393.453	
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	130.393.453	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.435.281	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.034.179	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	34.129.602	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.114.104	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.215.200	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.583.179	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.121.583.179	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	530.125.026	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	522.341.673	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	515.763.138	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	39.349.717	
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.976.723	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.018.960	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.445.531.296	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.445.531.296	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.647.103.813	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	828.471.181	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.302.014	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	145.964.010	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.865.125.611	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.285.034	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.980.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	509.856.425	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	504.897.750	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	500.948.416	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	140.640.741	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.100.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.888.964.558	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.229.334	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	128.798.407	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.532.544	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.529.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.608.774.325	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	504.949.062	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	504.949.062	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.044.032.813	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.571.244	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	367.046.636.492	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	10.307.912	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.310.373.391	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.310.373.391	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	146.455.735	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.852.189	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.795.364	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	14.493.572.005	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	245.678.647	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	245.678.647	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	973.811.014	
5.03.02.2.03.07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	21.340.900	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.089.581.815	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.850.863.486	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.420.559	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	83.610.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.532.657.279	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.063.386.750	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	45.330.484	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.773.076.537	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	96.159.964	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.937.648	
3.26.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.597.998.311	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.851.784.022	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.851.784.022	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.636.274.994	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.428.103.073	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.946.359	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	42.636.359	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	303.489.818	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	303.489.818	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	303.489.818	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.316.040.597	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.096.450.653	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.443.200	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.3.30.0.00.03.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	15.027.939.644	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.899.743.411	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.089.715	
2.17.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.752.864	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	112.492.618.398	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	47.501.659.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	565.400.239	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	489.351.207	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	246.444.352	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	72.439.583	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.346.741.830	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.031.074	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.802.625.187	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	255.916.675	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	216.852.700	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	8.256.625	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.879.384	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	62.967.570.154	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.681.405.450	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.042.034.757	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.613.433	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.039.080.500	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.960.008	
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	431.238.995	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	69.744.276.059	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	69.744.276.059	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3.433.990.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.773.076.537	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75.415.018	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	23.638.661	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.441.599.530	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.264.243.189	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	82.048.684.255	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	82.048.684.255	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	483.678.182	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	484.156.309.396	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.765.073.990	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	146.264.855	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.427.625	
3.26.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.796.023	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	84.125.855	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.125.855	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.125.855	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	545.532.544	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	375.697.095	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	38.120.997.035	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.441.757.118	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.489.958	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.879.603.567	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	379.233.180	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	310.540.716	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	70.298.240	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	121.382.148	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	106.331.041	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35.874.234	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kuta	25.905.026.352	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.897.422.471	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.627.351.905	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	7.081.984	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.03	KEPEGAWAIAN	15.480.381.502	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.480.381.502	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.947.724.223	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.861.443	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.787.599	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.760.844	
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.0.00.0.00.10.0000	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	115.429.148.404	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.223.350.071	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.223.350.071	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.769.883.663	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.389.823	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	653.403.153	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.380.643.864	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.380.643.864	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.201.593.783	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.177.687.530	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.2.09.0.00.10.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	66.410.464.420	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	12.167.571.535	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.388.192	
3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	33.388.192	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40.790.286	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.500.703.440	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.066.935	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.671.155	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.841.986.029	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197.069.868	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	28.595.351.723	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	28.595.351.723	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	277.352.210	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.448.944.284	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	998.515.941	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	267.117.667	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	39.430.734	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.433.139	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	528.477.219	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.930.565.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Kuta Selatan	22.467.805.527	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.839.131.406	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.674.887	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.578.400	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.689.823	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.979.235	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.550.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.238.565	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.199.000	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.02	KEUANGAN	631.898.885.266	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	516.469.736.862	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.812.724.026	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.812.724.026	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.805.164.059	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.896.213	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.759.296.683	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	7.010.613	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.310.373.391	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	1.310.373.391	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	1.163.917.656	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	47.800.060.065	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.306.488.060	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.946.443.814	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.150.665	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.201.593.783	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.700.419	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Petang	11.521.162.312	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.995.277	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.378.233	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.060.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	987.724.655	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	161.599.591	
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	96.455.746	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	349.954.820.712	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.951.134.309	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.943.344.419	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.004.058.836	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.918.649.911	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.119.994	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.119.994	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.0.00.0.00.12.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	124.510.082.840	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	69.744.276.059	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	69.744.276.059	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	66.229.608.473	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.2.07.0.00.05.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.445.372.081	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.708.457.372	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.459.445	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.328.533	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.773.651	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.590.368	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	33.754.615.031	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.553.718.818	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.029.545	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.029.545	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	157.043.713.043	
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	157.043.713.043	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.365.749.814	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	1.365.749.814	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	491.054.034	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.067.082.211	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.201.480.009	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.345.493	
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.120.885	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.102.617.074	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	513.607.763	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.100.757.824	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	149.984.103	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	45.702.045	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	72.287.471.237	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	51.278.954.487	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.501.247.738	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	42.697.991.739	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	672.223.554.600	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	2.390.663.773	
1.02.0.00.0.00.01.0100	Rumah Sakit Daerah Mangusada	306.083.306.526	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.812.938.120	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.389.097.149	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	202.722.120	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16.466.799.304	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.466.799.304	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.482.070.374	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.300.990	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.427.300	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.350.611.130	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	136.247.435	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	42.720.145	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.546.747.518	
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.126.965.030	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan	13.324.285.991	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.776.294.319	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	564.865.405	
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.938.500	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.02	SEKRETARIAT DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	124.287.081.129	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.319.510.975	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	505.459.838	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	203.463.000	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	112.988.043.067	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	238.455.948	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mengwi	32.725.145.229	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.095.271.351	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.899.258	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.115.901	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.14.2.08.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.476.851.740	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.790.314.447	
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.704.802	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.193.152	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	776.681.434.542	
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	776.681.434.542	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	350.644.098.775	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.050.658.190	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	10.191.205.693	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.411.602	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.961.681	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	22.930.434.085	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	651.689.555	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	221.085.378	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	47.433.270	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.748.053.563	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.921.499.518	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.103.805	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.212.878	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	75.398.723.757	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	23.835.686.424	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.300.020.943	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	691.219.915	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.704.620.323	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	75.878.605	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40.008.008	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	27.577.066	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	99.263.156	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99.263.156	
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11.766.959	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42.866.863.900	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.518.070.663	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.852.189	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.091.825	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	
4.01.2.10.7.01.02.0000	Sekretariat Daerah	198.906.052.824	

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	189.413.455.986	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.033.613.433	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.754.562	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Abiansemal	13.117.692.477	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.448.827.497	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.411.602	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	357.853.341	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	39.903.368.377	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.025.920.339	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.823.061.524	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.823.061.524	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.465.527.230	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.910.852.134	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.330.793.400	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	762.614.723	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	673.897.846	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	127.728.118.072	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kuta Utara	21.633.121.140	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.164.238.897	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.997.046	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.689.823	

**Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.421.108.360.698
2	Belanja Barang dan Jasa	1.378.206.587.116
3	Belanja Bunga	16.307.361.501
4	Belanja Subsidi	4.300.500.000
5	Belanja Hibah	369.031.382.188
6	Belanja Bantuan Sosial	21.227.500.000
7	BELANJA MODAL	204.169.916.118
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.643.045.229
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.417.191.667
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.807.235.761
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.302.443.461
8	Belanja Tidak Terduga	64.990.959.398
9	Belanja Bagi Hasil	314.958.783.884
10	Belanja Bantuan Keuangan	80.502.776.000
	TOTAL	3.874.804.126.903

**Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	
	Pembiayaan Netto	0	

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Mangupura, 5 Agustus 2022

